LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN 2021

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
TAHUN 2021

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja tahun 2021 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2021, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk tahun 2020 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Di tahun 2021, dalam pengejewantahan kinerjanya, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan berdasarkan Sasaran Strategis tersebut terdapat 10 Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Seluruh Indikator Kinerja tersebut diperoleh melalui proses *cascading* Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 14 Januari 2022
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

ISI

Kata Pengantar i

ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GRAFIK vii

RINGKASAN EKSEKUTIF viii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

Pendahuluan 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1

Isu Strategis 3

BAB II 4

PERENCANAAN KINERJA 4

Kegiatan 4

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021 4

BAB III 6

AKUNTABILITAS KINERJA 6

Capaian Kinerja 6

Analisis Capaian Kinerja 8

IKU 1: Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN 9

IK 2: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan 16

IKU 3: Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro HKLN 19

IKU 5: Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama 27

IKU 6: Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang ektor Kelautan dan Perikanan 34

IKU 7: Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN 42

IKU 8: Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN 43

IKU 9: Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 47

IK 10: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN 50

Realisasi Anggaran Biro HKLN Tahun 2021 53

Apresiasi Sepanjang Tahun 2021 55

BAB IV 59
PENUTUP 59
Kesimpulan 59
Saran 60
BAB IV 61
LAMPIRAN 61
1. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 (ditandatangani pada Januari 2021) 61
2. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 pasca revisi (ditandatangani pada 1 September 2021) 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 *Screen Capture* Aplikasi Kinerjaku tanggal 11 Januari 2021..... 7
Gambar 2 Sekretaris Jenderal KKP mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi tahun 2021 di lingkup Sekretariat Jenderal 18
Gambar 3 Peringkat Biro HKLN dalam IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal .. 22
Gambar 4 Wakil Presiden RI Menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 secara simbolis melalui konferensi video 26
Gambar 5 Menteri KP Menerima kunjungan Duta Besar Norwegia Dalam Rangka Koordinasi dan Peningkatan Kerja Sama dalam Sektor Kelautan dan Perikanan..... 33
Gambar 6 Menteri KP secara mutlak mendukung penuh citra kebijakan KKP yang positif terhadap publik melalui publikasi oleh media 41
Gambar 7 Peresmian Logo Baru KKP oleh Menteri KP yang diliput dan di-*broadcast* oleh Neptune TV (inovasi baru komunikasi publik KKP yang diluncurkan pada 14 September 2021) 41
Gambar 8 Menteri KP Memberi Perhatian Penuh Kepada Pembangunan Profesionalisme ASN KKP . 46
Gambar 9 Inspektur Jenderal KKP memimpin Inspektorat Jenderal KKP merumuskan rekomendasi hasil pengawasan untuk dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja..... 52
Gambar 10 Penghargaan TPB/SDGs Tahun 2021 dari Kementerian PPN/Bappenas..... 56
Gambar 11 Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2021 kategori Kementerian dan Menteri 57
Gambar 12 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro HKLN Tahun 2021 2
Tabel 2 Daftar Indikator Kinerja Biro HKLN Tahun 2021..... 5
Tabel 3 Realisasi Indikator Kinerja Biro HKLN pada Tahun 2021 6
Tabel 4 *Template* ringkasan capaian kinerja..... 8
Tabel 5 Ringkasan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN tahun 2020 dan 2021..... 9
Tabel 6 Informasi Target dan Realisasi IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN atau IKU sejenis pada 5 tahun terakhir..... 9
Tabel 7 Ringkasan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan16
Tabel 8 Informasi target dan perolehan realisasi IK Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan pada 5 tahun terakhir 16
Tabel 9 Ringkasan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN 19
Tabel 10 Informaso realisasi dan target IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN tahun 2016-2020 .. 19
Tabel 11 Hasil Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2021..... 21
Tabel 12 Ringkasan capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik..... 23
Tabel 13 Informasi target dan realisasi IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016-2020 ... 23
Tabel 14 Daftar 20 Besar Badan Publik Kategori Kementerian dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Pusat..... 25
Tabel 15 Ringkasan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021 27
Tabel 16 Informasi besar target dan realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama pada lima tahun terakhir 27
Tabel 17 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021 28
Tabel 18 Daftar realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021 berdasarkan kelompok substansi..... 31
Tabel 19 Status realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti 32
Tabel 20 Ringkasan Capaian IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan..... 34
Tabel 21 Informasi target dan Realisasi IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan tahun 2016-2020..... 34
Tabel 22 Ringkasan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN..... 42
Tabel 23 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN pada tahun 2016 sampai dengan 2020..... 42
Tabel 24 Ringkasan Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN..... 43
Tabel 25 Informasi target dan Realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN 5 tahun terakhir . 43
Tabel 26 Target dan Realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2016 s.d. 2020 46
Tabel 27 Ringkasan Capaian IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 47
Tabel 28 Informasi target dan realisasi IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen tahun 2016 sampai tahun 2020..... 47
Tabel 29 Realisasi IKU Persentase unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menerapkan sistem manajemen tahun 2021 49
Tabel 30 Ringkasan Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN..... 50

Tabel 31 Informasi besar target dan realisasi IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2016-2020..... 50
Tabel 32 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2021..... 52
Tabel 33 Realisasi Anggaran Biro HKLN tahun 2021..... 53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN Tahun 2020 dan 2021 15
Grafik 2 Perbandingan realisasi dan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan 18
Grafik 3 IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN 2021 22
Grafik 4 IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik Biro HKLN tahun 2020 dan 2021 26
Grafik 5 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 dan 2021 27
Grafik 6 *Top ten* media penyampai berita sektor kelautan dan perikanan pada September 2021..... 38
Grafik 7 Sepuluh besar media dalam pemberitaan sektor kelautan dan perikanan pada November 2021 39
Grafik 8 *Top ten* media dalam pemberitaan sektor kelautan dan perikanan pada Desember 2021.... 40
Grafik 9 Perbandingan realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2020, 2021 dan target tahun akhir Renstra 2024 43
Grafik 10 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2020 dan 2021 47
Grafik 11 Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2020 dan 2021 50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Posisi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menanggungjawabi koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana di dalamnya diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal dan lebih luas lagi yaitu di Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki dan menempati posisi strategis yaitu secara timbal balik berperan sebagai *hub* atau penghubung, termasuk pengendali hubungan, antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan organisasi pemerintah dan nonpemerintah dari negara asing mitra Indonesia dan organisasi kerja sama regional dan internasional. Selain Itu, peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dalam merelasikan dan mengomunikasikan kebijakan dan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama yang dirumuskan para jajaran pimpinannya kepada publik eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di Indonesia dan di luar negeri serta sampai kepada batas tertentu dengan publik internal turut memiliki nilai strategis penting.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2021 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban Sasaran Strategis yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Sasara n Strategis tersebut dikonkretkan ke dalam 10 Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Periode pengukuran seluruh IK dan IKU tersebut dilakukan secara triwulan, semester dan tahunan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengukuran, diperolehlah skor kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dimana pada tahun 2021 meraih skor sebesar 105,62. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar pada tahun 2021 telah berhasil memenuhi semua target kinerja dan tanggung jawab sebagai instansi pemerintah.

Dari ke-10 IK dan IKU tersebut, hanya 1 yang capaiannya tidak 100%. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya dimana pada tahun anggaran 2022 Indikator Kinerja tersebut kembali menjadi salah satu dari tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Indikator Kinerja tersebut adalah Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan yang realisasinya hanya 3,73, di bawah target 2021 yaitu 4,3. Tentu saja sudah cukup banyak pengalaman yang diperoleh dari segenap upaya dan usaha yang dilakukan meski tidak berbuah keberhasilan. Hendaknya semuanya itu bisa digunakan sebagai catatan berharga untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan sehingga kegagalan tidak terulang lagi.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, atas dasar kiprah Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, pada tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih 3 penghargaan dalam bidang kehumasan dan dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Tentu saja perolehan ini dapat membanggakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menjadi inspirasi bagi unit-unit kerja lain untuk sama-sama berprestasi. Terlebih pada tahun 2021, pandemi covid-19 belum berakhir dan kondisi ini selain menghambat laju dinamika dan ritme kegiatan juga mengakibatkan pemotongan anggaran dalam jumlah yang cukup substansial.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama tahun 2021 (tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2021 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan perkembangan pencapaian indikator kinerja tanggung jawabnya masing-masing melalui sistem aplikasi kinerjaku secara online (www.kinerjaku.kkp.go.id) dan per triwulan dilakukan pembahasannya bersama dengan pengelola kinerja Biro HKLN sambil berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Kinerja Sekretariat Jendral yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/Kepmen-KP/2021 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan, sasaran,
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, dan
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan panjang, dan
- Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Terhitung dari tanggal 29 September 2020, struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

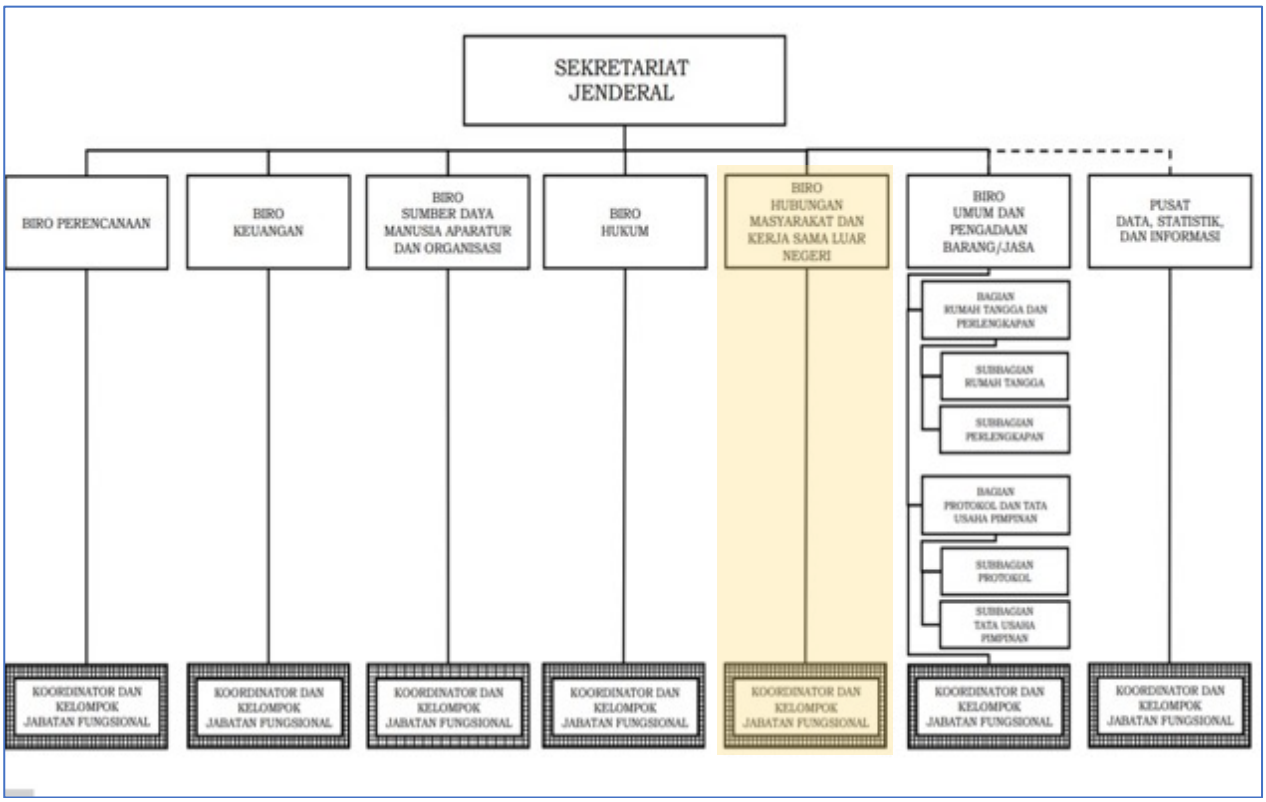

Struktur Organisasi Biro HKLN (Dalam Kotak Kuning), Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada akhir tahun 2021 berjumlah 71 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

No	Substansi/Kelompok	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Hubungan Masyarakat	10
3	Kerja Sama Bilateral	9
4	Kerja Sama Regional dan Multilateral	7
5	Tata Usaha	11
6	PNS Tugas Belajar	2
7	Calon PNS	6
8	Pegawai Pemerintah Non PNS/PPNPN	25
Jumlah		71

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro HKLN Tahun 2021

Biro HKLN sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Jenderal KKP tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi yang diemban Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Sekretariat Jenderal KKP telah merumuskan visinya yaitu:

"Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP".

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, maka rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Oleh karena itu bagi Biro HKLN isu strategis dipandang sebagai kondisi yang harus diperhatikan/diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi dan menjadi perhatian Biro HKLN pada tahun 2021 adalah:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan *IUU Fishing,* dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada *Blue Economy,*
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
3. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Biro HKLN (pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang efektif), sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri ditindaklanjuti yang efektif. Indikator yang harus dicapai diantaranya adalah:

1. Persentase dokumen diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama; dan
2. Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif dibanding total pemberitaan sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro HKLN pada awal tahun anggaran 2021 mengelola anggaran sebesar Rp 46.307.790.000,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta tujuh tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah dilakukan revisi anggaran dalam rangka *refocusing* covid-19 maka pada semester II tahun 2021 anggaran yang dikelola Biro HKLN berubah menjadi Rp 19.379.761.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah). Sebagai konsekuensi dari revisi anggaran, Perjanjian Kinerja Biro HKLN turut mengalami revisi pada pertengahan tahun. Lembar Perjanjian Kinerja Biro HKLN awal 2021 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN pasca revisi anggaran dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Biro HKLN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Biro HKLN Tahun 2021-2024 maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Oleh karena itu, guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan adanya butir-butir indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian target kinerja yang keseluruhannya dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang di dalamnya memuat Sasaran Strategis dan butir-butir Indikator Kinerja juga termaktub Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sekaligus merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Perumusan perjanjian kinerja juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, target kinerja Biro HKLN masih dijabarkan ke dalam sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dan diakadkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Biro HKLN yang ditandatangani antara Sekretaris Jenderal KKP dan Kepala Biro HKLN. Pada pertengahan tahun 2021, Perjanjian Kinerja Biro HKLN mengalami revisi akibat dilakukannya revisi anggaran berupa pemotongan (*refocusing*) anggaran pada dalam rangka pemfokusan untuk pembiayaan mengatasi pandemi Covid-19. TIdak ada perubahan pada butir Indikator Kinerja dan besar target setiap Indikator Kinerja antara Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 revisi pasca revisi anggaran.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membedakan IK dan IKU dengan penjelasan bahwa IK adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. IK instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business* yang diemban). IKU dipilih dari seperangkat IK yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria IK yang baik. Adapun IKU dan IK Biro HKLN serta besar targetnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Jenis
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	1	Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro HKLN (nilai)	3,6	IKU
	2	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan	4,3	IK
	3	Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro HKLN	91	IKU
	4	Nilai keterbukaan informasi publik	85	IKU
	5	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama	90	IKU
	6	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	>86	IKU
	7	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN	100	IK
	8	Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN	73	IKU
	9	Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	84	IKU
	10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN	65	IK

Tabel 2 Daftar Indikator Kinerja Biro HKLN Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Tata Usaha Biro HKLN. Dalam pelaksanaan pengukuran dan pelaporan, Biro HKLN juga menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan merupakan aplikasi baku untuk seluruh unit kerja di lingkungan KKP terkait dengan tata kelola kinerja. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum dalam manual IK/IKU yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Biro HKLN.

Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN tahun 2021 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dalam Gambar 2, dapat dilihat *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal 11 Januari 2022 dimana berdasarkan hasil penghitungan oleh aplikasi, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau skor kinerja dari Biro HKLN tahun 2021 adalah 105,62.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	Capaian
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	1	Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggungjawab Biro HKLN (nilai)	3,6	3,91	108,61%
	2	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan (nilai)	4,3	3,73	86,74%
	3	Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro HKLN (nilai)	91	96,30	105,82%
	4	Nilai keterbukaan informasi publik nilai (nilai)	85	96,00	112,94%
	5	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (persen)	90	105,71	117,45%
	6	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	>86	99,17	113,28%
	7	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN (persen)	100	100	100%
	8	Indeks profesionalitas ASN Bio HKLN (indeks)	73	77,53	106,20%
	9	Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	93,98	111,88%
	10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN (persen)	65	65	100%

Tabel 3 Realisasi Indikator Kinerja Biro HKLN pada Tahun 2021

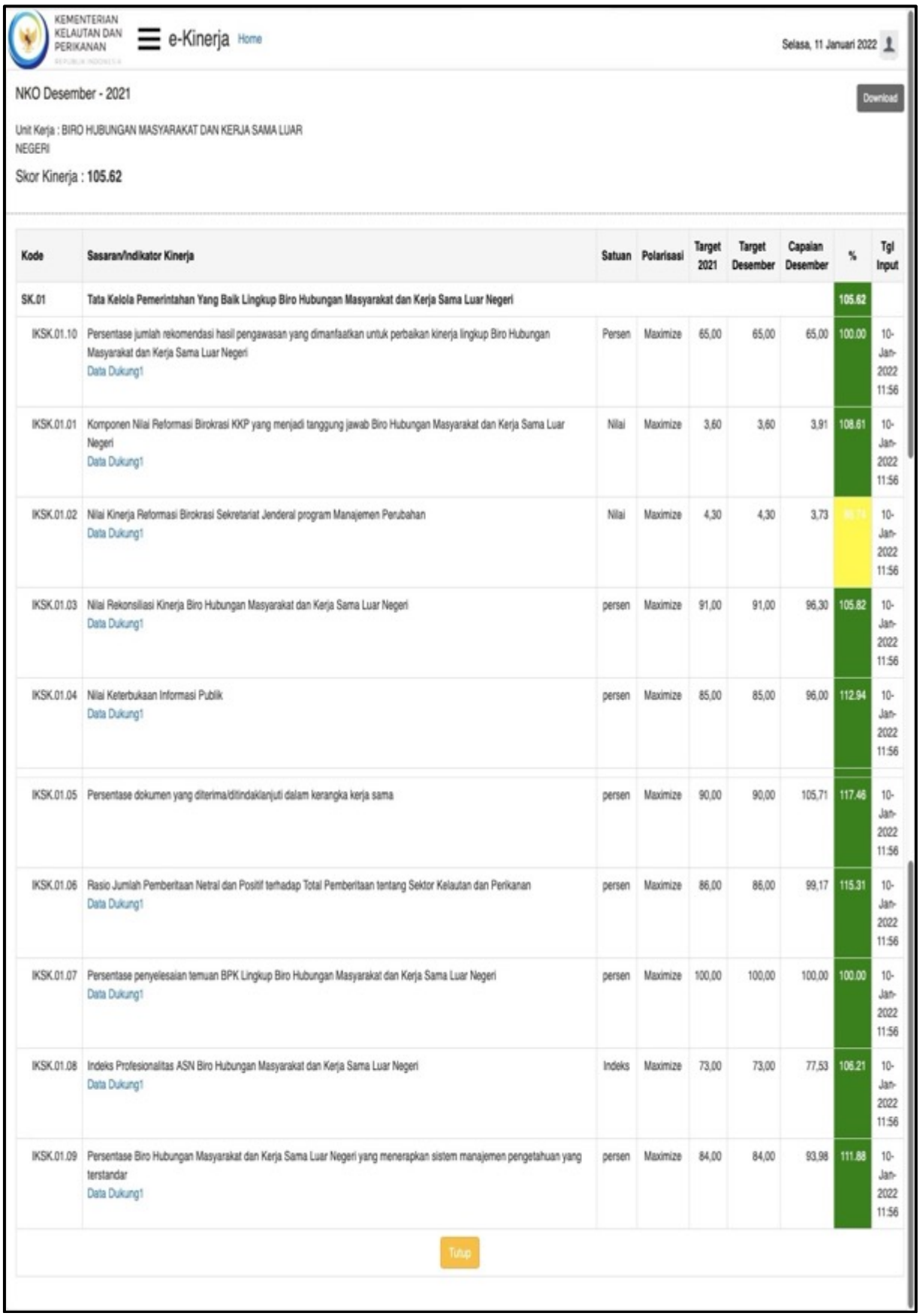

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

e-Kinerja Home

Selasa, 11 Januari 2022

NKO Desember - 2021

Download

Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Skor Kinerja : **105.62**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2021	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri**						105.62	
IKSK.01.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Persen	Maximize	65,00	65,00	65,00	100.00	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.01	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Nilai	Maximize	3,60	3,60	3,91	108.61	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.02	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan Data Dukung1	Nilai	Maximize	4,30	4,30	3,73	86.74	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.03	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	persen	Maximize	91,00	91,00	96,30	105.82	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.04	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Data Dukung1	persen	Maximize	85,00	85,00	96,00	112.94	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.05	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama	persen	Maximize	90,00	90,00	105,71	117.46	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.06	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan Data Dukung1	persen	Maximize	86,00	86,00	99,17	115.31	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.07	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	persen	Maximize	100,00	100,00	100,00	100.00	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.08	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1	Indeks	Maximize	73,00	73,00	77,53	106.21	10-Jan-2022 11:56
IKSK.01.09	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Data Dukung1	persen	Maximize	84,00	84,00	93,98	111.88	10-Jan-2022 11:56

Tutup

Gambar 1 *Screen Capture* Aplikasi Kinerjaku tanggal 11 Januari 2021

Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap semua pernyataan kinerja turunan yang sebagai turunan dari sasaran strategis "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri". Metode analisis menggunakan arahan yang direkomendasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun/periode berjalan,
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun/periode tahun ini dengan tahun/periode yang sama tahun lalu,
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah di dalam dokumen rencana strategis (keterangan: rencana strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024),
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan dengam standar nasional (keterangan: tidak ada Indikator Kinerja di Biro HKLN yang memiliki standar nasional),
e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang sudah dilakukan,
f. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan
g. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memudahkan menyajikan ringkasan hasil kinerja sebagaimana arahan di atas, diupayakan agar semua menggunakan *template* tabel dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			

Tabel 4 *Template* ringkasan capaian kinerja

Dokumen rencana strategis yang berisi target jangka menengah dan yang menjadi dasar analisis dalam laporan kinerja ini adalah dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Adapun analisis atas realisasi dan capaian IK dan IKU Biro HKLN pada tahun 2020 secara lengkap tersaji dalam uraian di bawah ini.

IKU 1: Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
3,6	3,91	108,61%	3,55	4,11	115,77%	3,75	Nihil	104,27%

Tabel 5 Ringkasan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN tahun 2020 dan 2021

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	4,11

Tabel 6 Informasi Target dan Realisasi IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN atau IKU sejenis pada 5 tahun terakhir

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Untuk memastikan pengelolaan RB secara efektif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB nasional, yaitu Road Map RB tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Saat ini RB telah memasuki periode ketiga. Pada tahap terakhir ini, RB diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk mencapai harapan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun sasaran RB periode 2020-2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Secara umum, pelaksanaan RB dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

1. Nasional → Pada tingkat nasional, pelaksanaan RB dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.
    a. Makro → Mencakup penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada tingkat meso dan mikro.
    b. Meso → Mencakup pelaksanaan program RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.
2. Instansional → Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan Mikro yang mencakup implementasi kebijakan/program RB pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program Makro, Meso dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan RB yang selaras dengan program RB nasional.

Aktifitas Mikro mengacu pada sasaran RB serta delapan area perubahan RB dan program di level Meso. Khusus pada area manajemen perubahan, indikator yang ditetapkan, yaitu “Indeks Kepemimpinan Perubahan” dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);

2. Penguatan nilai integritas;
3. Pengembangan dan penguatan peran Agen Perubahan dan role model; dan
4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.

Pelaksanaan RB di KKP mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/SJ Tahun 2021 tentang Subtim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Berdasarkan dua Keputusan Menteri tersebut, Biro HKLN menjadi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) area manajemen perubahan.
Sepanjang periode Triwulan IV tahun 2021, adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro HKLN dalam pelaksanaan RB KKP, yaitu:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB Area Manajemen Perubahan Triwulan III lingkup KKP yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Natuna (Gedung Mina Bahari I lantai 5) pada tanggal 5 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh unit kerja eselon I (kecuali Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut).
- Pelaksanaan rapat persiapan pemantauan rencana kerja Agen Perubahan tahun 2021 yang dilaksanakan secara luring di Perpustakaan KKP (Gedung Mina Bahari IV lantai 2) pada tanggal 16 November dan 3 Desember 2021.
- Pelaksanaan pemantauan rencana kerja Agen Perubahan tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 Desember 2021. Perwakilan 1 Agen Perubahan dari masing-masing unit kerja eselon I KKP melakukan paparan terkait capaian rencana kerjanya dan diberikan masukan/tanggapan dari Kementerian PAN dan RB.

- Pembuatan video dalam rangka internalisasi *core values* BerAKHLAK di lingkungan KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Pejabat Eselon I. Video tersebut kemudian diluncurkan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2021 di Ballroom KKP.

- Pembuatan video tiktok dalam rangka internalisasi core values BerAKHLAK di lingkungan KKP pada akun tiktok KKP.

- Pelaksanaan rapat persiapan asesmen Agen Perubahan tahun 2022 yang dilaksanakan secara luring bertempat di Perpustakaan KKP (Gedung Mina Bahari IV lantai 2) pada tanggal 24 Desember 2021.
- Pelaksanaan sosialisasi Road Map RB melalui Brief Note RB yang dapat diakses pada laman https://kkp.go.id/kategori/830-Brief-Note-RB.
- Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan KKP yang dapat diakses melalui tautan https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eMZRMfhGLYXT_Cr8lXQVdOlRDv3XqmgP.

Realisasi atas IK ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan ruang lingkup evaluasi meliputi:

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya.
- Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Evaluasi ini meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah beserta unit kerja di dalamnya.

Adapun skema penilaian pelaksanaan RB adalah sebagai berikut.

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Pengungkit	60%	
	Aspek Pemenuhan	20%	Manajemen Perubahan (2%) Deregulasi Kebijakan (2%) Penataan Organisasi (3%) Penataan Tatalaksana (2,5%) Penataan Manajemen SDM (3%) Penguatan Akuntabilitas (2,5%) Penguatan Pengawasan (2,5%) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	Aspek Hasil Antara	10%	Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) Kulitas Pengelolaan Aset (1%) Merit System (1%) ASN Profesional (1%) Kualitas Perencanaan (1%) Maturitas SPIP (1%) Kapabilitas APIP (1%) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	Aspek Reform	30%	Manajemen Perubahan (3%) Deregulasi Kebijakan (3%) Penataan Organisasi (4,5%) Penataan Tatalaksana (3,75%) Penataan Manajemen SDM (4,5%) Penguatan Akuntabilitas (3,75%) Penguatan Pengawasan (3,75%) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2.	Hasil	40%	

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	Opini BPK (3%) Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	Kinerja Organisasi	10%	Capaian Kinerja (5%) Kinerja Lainnya (2%) Survei Internal Organisasi (3%)
Total		100%	

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/44/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi KKP tahun 2020 sebesar 78,27 dengan kategori "BB" dengan rincian indeks sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,93
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,33
	III. Reform	30,00	21,15
Total Komponen Pengungkit		60,00	43,41
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,74
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,11
Total Komponen Hasil		40,00	34,86
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	78,27

Target IKU ini di tahun 2021 adalah 3,6 dan berdasarkan pengukuran IKU, hasil IKI ini tahun 2021 adalah 3,91. Oleh karena besar target sebesar 3,6 maka capaian IKU menjadi:

$$(3,91/3,6) \times 100\% = 108,61\%$$

Dan jika dibandingkan dengan target akhir masa Renstra Setjen 2020-2024 yaitu sebesar 3,75 maka capaian IKU tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$(3,91/3,75) \times 100\% = 104,27\%$$

Hingga akhir tahun 2021, belum ada standar nasional untuk IKU ini sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 untuk IKU yang sama maka baik realisasi maupun capaian IKU ini mengalami penurunan yaitu realisasi turun dari dari 4,11 menjadi 3,91 dan capaian dari 115,77% menjadi 108,61%. Dalam Tabel 6, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2020 IKU ini bisa digunakan perbandingan karena dari tahun 2016 sampai 2019 tidak terdapat IKU di Biro HKLN yang ekivalen.

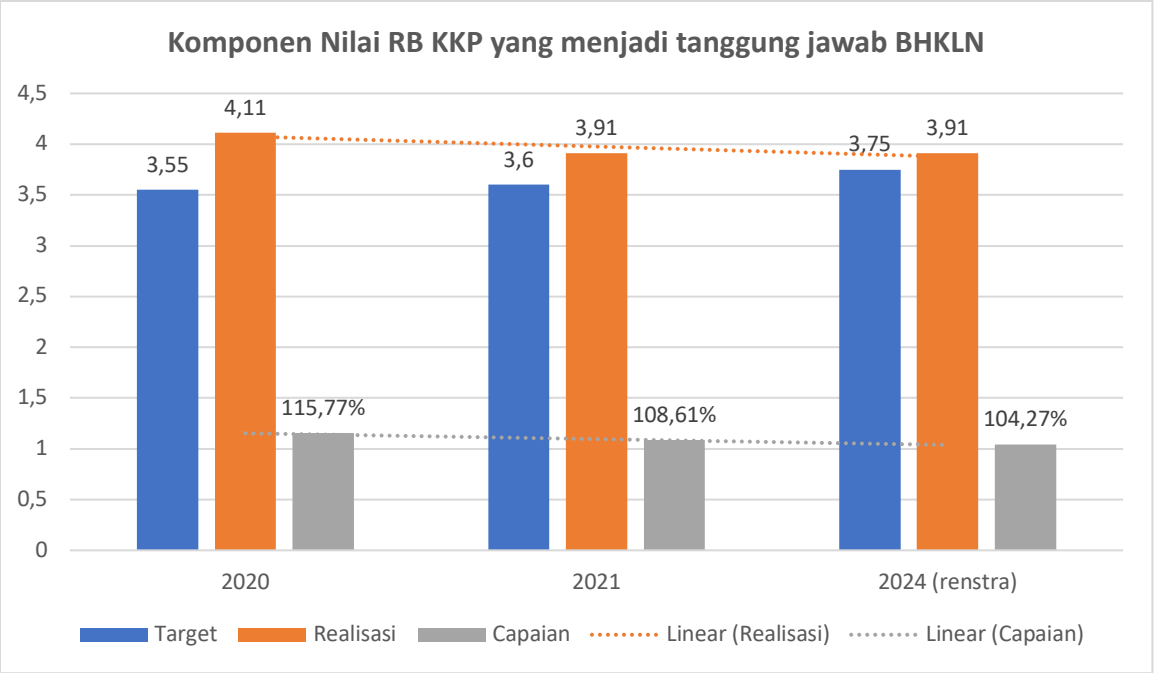

Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN Tahun 2020 dan 2021

Biro HKLN dalam pelaksanaan tanggung jawab~~nya~~ pada program manajemen perubahan sebagai salah satu area Reformasi Birokrasi di lingkup KKP sepanjang tahun 2021 telah menempatkan program ini sebagai daya dorong merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai yang bisa menumbuhkembangkan *spirit* dalam perubahan organisasi ke arah lebih baik dan profesional. Sebagaimana diketahui oleh ASN pada umumnya bahwa tujuan dari perubahan memiliki setidaknya 2 (dua) aspek yaitu yang pertama adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi, dalam hal ini adalah organisasi KKP, guna penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan dan yang kedua adalah mengupayakan perubahan perilaku pegawai untuk peningkatan produktivitasnya di lembaga.

Keberhasilan Biro HKLN dalam mengemban pencapaian target IKU Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN diantaranya ditopang oleh fakta bahwa sepanjang tahun 2021 sudah melewati tahap perencanaan, pengorganisasian/penyiapan strategi, sosialisasi, dan internalisasi pola pikir dan budaya kerja serta implementasi reformasi birokrasi pada KKP. Dengan demikian, secara keseluruhan pada tahun 2021 KKP telah melakukan perubahan-perubahan pada area atau program manajemen perubahan yang disusun dalam *Grand Design* pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* 2010-2025 Reformasi Birokrasi Indonesia. Perubahan yang terjadi tersebut setidaknya membantu KKP mencapai cita-cita Reformasi Birokrasi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi yang sudah mulai ditingkatkan serta profesionalisme SDM yang didukung oleh sistem-sistem kepegawaian yang telah diperbaharui.

IK 2: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan

Tahun 2021			Tahun 2020			Target akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
4,3	3,73	86,74%	5	4,24	84,80%	4,6	Nihil	81,08%

Tabel 7 Ringkasan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	5	4,67	5	4,71	5	5	5	4,24

Tabel 8 Informasi target dan perolehan realisasi IK Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan pada 5 tahun terakhir

Indikator kinerja ini adalah *cascading* salah satu Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KKP yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 18/KEP-SJ/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sebagai Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal. Metode *cascading* indikator kinerja ini adalah komponen pembentuk untuk menghasilkan indikator kinerja "Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal" sebagai bentuk komitmen seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di KKP secara umum.

Selain menjadi penanggung jawab atas indikator kinerja "Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN", Biro HKLN menjadi Penanggung Jawab RB Area Manajemen Perubahan untuk lingkup Sekretariat Jenderal. Penilaian atas implementasi RB di Sekretariat Jenderal dilaksanakan setidaknya sekali setahun melalui PMPRB yang kemudian hasilnya diverifikasi Tim Asesor dari Inspektorat Jenderal. Tidak berbeda dengan tahun 2020, pada tahun 2021 penghitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Konsensus PMPRB Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2021 Nomor: BAHK.PMPRB-01/ITJ/IV/2021 tanggal 27 April 2021, realisasi indikator kinerja ini untuk tahun 2021 adalah 3,73. Dengan target sebesar 4,3 maka capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$(3{,}73 / 4{,}3) \times 100\% = 86{,}74\%$$

Dibandingkan tahun 2020, realisasi indikator kinerja ini turun dari 4,24 menjadi 3,73 tetapi pada capaian mengalami peningkatan dari 84,80% menjadi 86,74%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka pendek sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, yaitu sebesar 4,6 maka capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 81,08%. Indikator kinerja ini tidak memiliki acuan atau standar (baku) target di tingkat nasional sehingga tidak bisa dihitung capaiannya. Adapun pengungkit komponen penilaian untuk Biro HKLN pada indikator kinerja ini terdiri dari:

a. Komponen penilaian pemenuhan (dengan bobot 2,00) untuk Area Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 1,57.
b. Komponen penilaian reform (dengan bobot 3,00) untuk Area Manajemen Perubahan meraih angka sebesar 2,16.

Total nilai = 1,57 + 2,16 = 3,73

Rencana kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Selain itu juga mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/SJ Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja Area Manajemen Perubahan tahun 2021, yaitu:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Renja program RB dan Quick Wins Sekretariat Jenderal;
3. Pencapaian nilai PMPRB Sekretariat Jenderal sesuai target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal;
4. Melakukan internalisasi nilai-nilai KKP oleh Pimpinan tertinggi;
5. Pemberian apresiasi kepada unit kerja dan/atau pegawai lingkup Sekretariat Jenderal yang melakukan perubahan (*reform*);
6. Sosialisasi Road Map RB KKP lingkup Sekretariat Jenderal;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Renja RB Sekretariat Jenderal yang selaras dengan Road Map RB KKP;
8. Pembentukan Tim PMPRB Sekretariat Jenderal;
9. Sosialisasi pelaksanaan PMPRB Sekretariat Jenderal;
10. Pelaksanaan PMPRB Sekretariat Jenderal oleh Asesor;
11. Melakukan reviu terhadap kertas kerja;
12. Melaksanakan konsensus PMPRB Sekretariat Jenderal;
13. Melaksanakan RATL;
14. Sosialisasi nilai-nilai KKP melalui media komunikasi lingkup Sekretariat Jenderal;
15. Menyusun Renja Agen Perubahan Sekretariat Jenderal yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen;
16. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Renja Agen Perubahan Sekretariat Jenderal secara berkala; dan
17. Internalisasi sistem integritas KKP di lingkup Sekretariat Jenderal.

Terdapat 3 kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2021, yaitu pencapaian nilai PMPRB Sekretariat Jenderal sesuai target dalam Rencana Strategis, menyusun Rencana Kerja Agen Perubahan yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen lingkup Sekretariat Jenderal, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Agen Perubahan secara berkala. Belum terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan karena Agen Perubahan lingkup Sekretariat Jenderal belum mengetahui peran dari masing-masing Agen Perubahan dalam melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Hal ini menjadi catatan penting bagi Biro HKLN sebagai penanggung jawab RB Area Manajemen Perubahan baik di KKP maupun di Sekretariat Jenderal.

Diharapkan pada tahun 2022, Biro HKLN dapat memenuhi target indikator kinerja ini dengan melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan seluruh Rencana Kerja RB Area Manajemen Perubahan yang akan ditetapkan di tahun 2022. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Biro HKLN dan Sekretaris Jenderal, target indikator kinerja ini sebesar 3,8. Biro HKLN sepenuhnya menyadari bahwa implementasi RB tidak dapat dilakukan hanya oleh Tim RB tetapi juga diperlukan peran serta dari Agen Perubahan dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

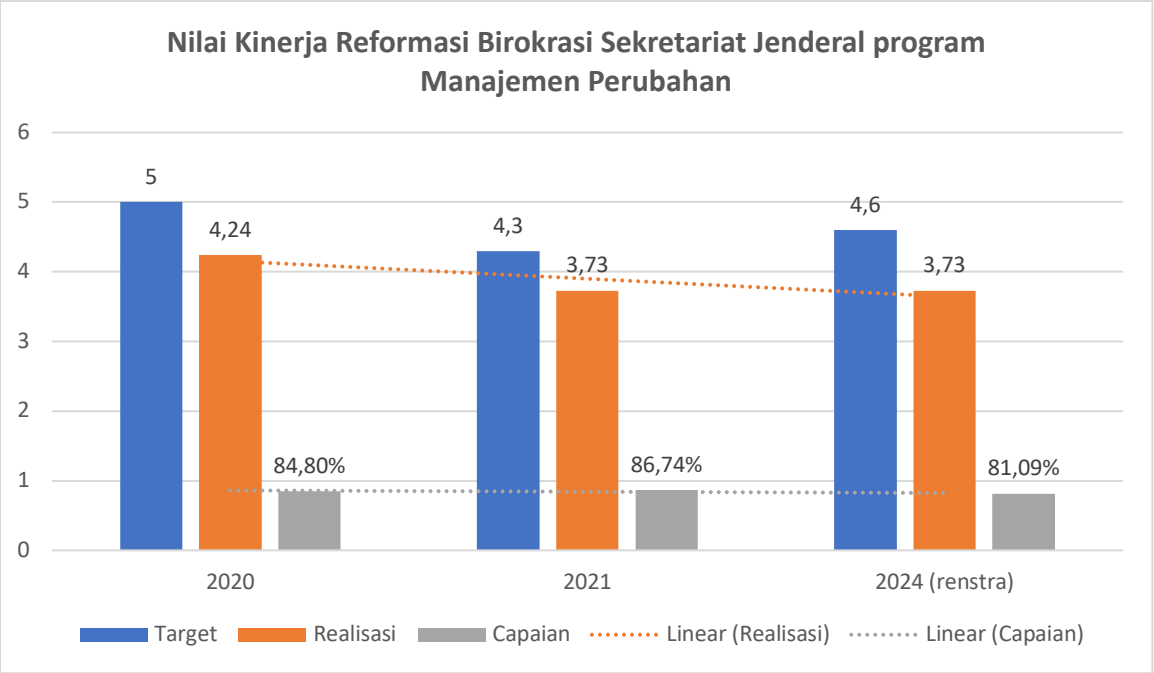

Grafik 2 Perbandingan realisasi dan capaian IK Nilai Kinerja RB Sekretariat Jenderal Program Manajemen Perubahan

Gambar 2 Sekretaris Jenderal KKP mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi tahun 2021 di lingkup Sekretariat Jenderal

IKU 3: Nilai Rekonsiliasi kinerja Biro HKLN

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
91	96,30	105,82%	90	89,05	98,94%	94	nihil	102,44%

Tabel 9 Ringkasan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	90	89,05

Tabel 10 Informaso realisasi dan target IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN tahun 2016-2020

Pada tahun 2021, Nilai rekonsiliasi kinerja Biro HKLN yang diukur hanya level 2 yang menjadi dasar dari penetapan hasil akhir IKU tahun 2021. IKU ini menggantikan Indikator Kinerja 'Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Biro HKLN' yang terakhir kali dicantumkan dalam lampiran Perjanjian Kinerja di lingkup Biro HKLN tahun 2019. Pada tahun 2021, target Nilai rekonsiliasi kinerja Biro HKLN sebesar 91.

Dalam rangka penyiapan Biro HKLN untuk penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilangsungkan pada November 2021, langkah awal yang diambil Biro HKLN adalah memperhatikan dengan saksama Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana di dalam Peraturan Menteri tersebut diberikan beberapa batasan atau pengertian untuk beberapa konsep yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengukuran kinerja, yaitu:

a. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan KKP untuk periode 1 (satu) tahun,
b. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi,
c. Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi,
d. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja serta merupakan merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh Organisasi dan dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan SS organisasi. Indikator kinerja bersifat definitif/terukur dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara kondisi ideal dengan realitas.
e. Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja,
f. *Cascading* adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah,
g. Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Terkait dengan *cascading* IKU, maka pada saat melakukannya terlebih dahulu hendaknya dilakukan identifikasi sifat IKU yang akan dilakukan *cascading* agar diperoleh metodenya. Terdapat 4 jenis metode *cascading* IKU yaitu:

a. Adopsi Langsung. Pada metode ini, kalimat dan definisi IKU pada level yang lebih tinggi diadopsi secara penuh oleh level yang lebih rendah serta IKU memiliki output yang identik/sama pada tiap level,

b. Komponen Pembentuk. Pada metode ini, kalimat dan definisi IKU di unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda sesuai dengan peran unit/satuan tersebut dalam pencapaian IKU. Hal ini karena realisasi IKU dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan kontribusi yang berbeda-beda. Realisasi dan capaian IKU pada unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari capaian IKU pada pada unit/satuan di level yang lebih rendah,
c. Lingkup Dipersempit. Pada metode *cascading* ini, kalimat dan definisi IKU unit/satuan di level yang lebih tinggi diturunkan ke lebih dari satu unit kerja dengan kalimat yang serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Hal ini karena nilai IKU tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level bawahnya dengan metode yang sama namun ruang lingkup sesuai unit kerja yang melaksanakan. Realisasi dan capaian IKU unit/satuan di level yang lebih tinggi merupakan rata-rata dari capaian IKU unit/satuan di level yang lebih rendah, dan
d. Buat Baru. Pada metode *cascading* ini, IKU bukan merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di level yang bersangkutan. IKU dengan metode ini dapat merupakan IKU yang berkontribusi secara tidak langsung pencapaian IKU atasan, IKU yang menggambarkan tugas spesifik dari unit yang bersangkutan yang tidak berkorelasi dengan atasannya dan IKU yang dibentuk karena ada tugas khusus atau mandat (mandatory) dari atasannya. Ketentuan untuk metode cascading ini adalah tidak ada tanggung jawab pencapaian target yang cascaded dari unit/satuan yang lebih tinggi, target atau realisasi IKU Unit/satuan yang lebih rendah tidak dikonsolidasikan ke Unit/satuan diatasnya dan jenis output tidak identik/tidak sama.

Metode Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dari Biro Perencanaan dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja diharuskan untuk menyiapkan dokumen sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja 2021
b. Manual IKU 2021
c. Rincian Target IKU 2021
d. Rencana Aksi 2021
e. LKJ Triwulan I, II, dan III 2021
f. Dokumen data pendukung LKJ Triwulan III 2021

Rekonsiliasi juga dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen di atas serta keabsahannya dan membandingkan hasil yang termaktub di dalam dokumen-dokumen di atas dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjaku. Capaian diukur dengan intrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

1. Aspek kepatuhan [bobot 25%], yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Laporan Kinerja, data dukung laporan kinerja;
2. Aspek kesesuaian [bobot 25%], yaitu evaluasi data antar dokumen kinerja dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku;
3. Aspek ketercapaian [bobot 30%], diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi kinerjaku; dan
4. Aspek ketepatan [bobot 20%], diukur dari ketepatan pelaporan atas Laporan Kinerja ke atasan dan pelaporan dokumen ke aplikasi eSakipReviu

Nilai rekonsiliasi kinerja dihitung sebagai berikut:

(25% x Nilai aspek kepatuhan) + (25% x Nilai aspek kesesuaian) + (30% x Nilai aspek ketercapaian) + (20% x Nilai aspek ketepatan)

Hasil Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja kepada Biro HKLN terangkum dalam nilai sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor per aspek	Skor x Bobot	Total Skor
1	Kepatuhan	25%	100	25	96,30
2	Kesesuaian	25%	97,5	24,38	
3	Ketercapaian	30%	107,69	26,92	
4	Ketepatan	20%	100	20	

Tabel 11 Hasil Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2021

Catatan/rekomendasi dari Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

A. Aspek Kepatuhan
   1. Pada dokumen rincian target IKU perlu ditambahkan pola akumulasi perhitungan;
   2. Pada dokumen rencana aksi:
      - Perlu diperjelas keterangan kegiatan dalam pencapaian IKU,
      - Kolom realisasi, tindak lanjut, rekomendasi dan permasalahan tidak perlu dicantumkan,
      - Jika ada perubahan aksi maka target yang dicantumkan maupun penjabaran target agar disesuaikan,

B. Aspek Kesesuaian
   1. Dokumen manual IKU: dokumen telah sesuai akan tetapi pada cara perhitungan perlu ditambah dengan penjelasan yang lebih rinci,
   2. Pada IKU 1 perlu ditambahkan bahwa sumber data IKU adalah Komisi Informasi Publik, bentuk data diubah menjadi '*raw data*', dan perhitungan atasan menjadi KPI sendiri,
   3. Terdapat ketidaksesuaian data antara rincian target IKU dengan aplikasi kinerjaku yaitu pada:
      a. IKU 5: Target triwulan III berbeda dengan aplikasi kinerjaku
      b. IKU 10: Target triwulan I sampai dengan III berbeda dengan pada aplikasi kinerjaku. Indikator seharusnya mulai ditargetkan sebesar 65% pada triwulan I tahun 2021.

C. Aspek Ketercapaian
   Target triwulan I sampai dengan III 2021 telah melampaui 100%, dan

D. Aspek Ketepatan
   Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan dan Tahun kepada aplikasi esr Kementerian PANRB dan kepada atasan langsung telah dilakukan tepat waktu

Hasil rekonsiliasi kinerja adalah 96,30, dengan besar target 2021 adalah 91 maka capaian IKU adalah:

(96,30 / 91) x 100% = 105,82%

Realisasi IKU akhirnya berhasil memenuhi dan melampaui target karena pada tahun 2020 gagal. Adapun penyebab utama dari keberhasilan pemenuhan target IKU adalah ditindaklanjutinya rekomendasi dari kegagalan tahun sebelumnya yaitu peningkatan kecermatan pelaksana dari Biro HKLN yang menghadiri rekonsiliasi kinerja dalam penyiapan dokumen pendukung. Oleh karena itu, pada tahun 2021 berulangnya ketidakcermatan berhasil dicegah dengan baik. IKU ini tidak memiliki

standar nasional. Untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN berhasil menduduki peringkat ke-4 tertinggi (Gambar 3). Tentu saja ke depannya diharapkan Biro HKLN memperbaiki posisinya selain meningkatkan perolehan besar IKU.

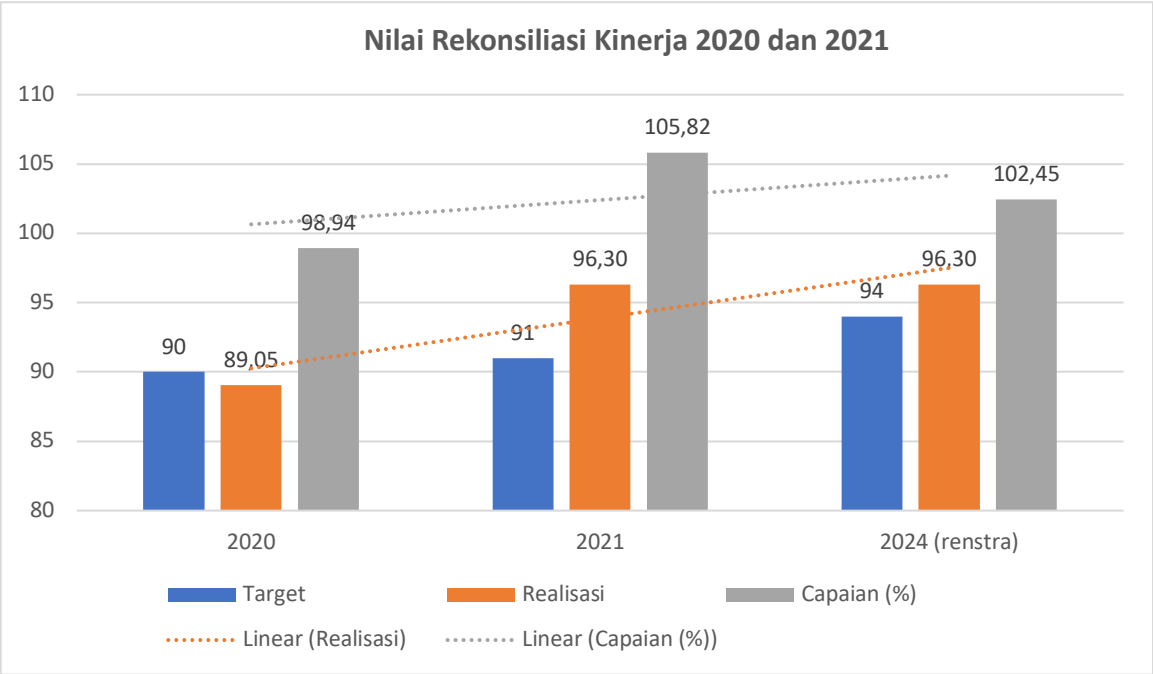

Grafik 3 IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro HKLN 2021

Unit	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan	Nilai Rekon
Pusdatin	25,00	25,00	27,88	20,00	97,88
Biro Umum dan PBJ	25,00	25,00	27,11	20,00	97,11
Biro Hukum	25,00	25,00	26,94	20,00	96,94
Biro Humas dan KLN	25,00	24,38	26,92	20,00	96,30
Biro Perencanaan	25,00	25,00	26,00	20,00	96,00
Biro Keuangan	25,00	25,00	24,73	20,00	94,73
LPMUKP	25,00	25,00	23,68	20,00	93,68
Biro SDMAO	25,00	23,30	24,13	17,00	89,43
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan PBJ	30,00	29,52	36,65	Level 3 tidak dinilai aspek ketepatan	96,18
Sub Bagian Perlengkapan, Biro Umum da PBJ	30,00	30,00	33,08	Level 4 tidak dinilai aspek ketepatan	93,08

Gambar 3 Peringkat Biro HKLN dalam IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di lingkup Sekretariat Jenderal

IKU 4: Nilai keterbukaan informasi publik

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
85	96,00	112,94%	81	92,08	113,68	82	Nihil	117,07%

Tabel 12 Ringkasan capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	80	85,96	85	68,82	80	90,4	81	92,06

Tabel 13 Informasi target dan realisasi IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016-2020

Reformasi yang mencakup reformasi pada penyelenggaraan pemerintah (RB) menciptakan tuntutan baru masyarakat yaitu tata kelola kepemerintahan yang baik atau *good governance*. Beberapa syarat utama memenuhi terpenuhinya good governance adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik. Modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat sehingga instansi pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan membuka diri kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan kebijakan yang diperlukan masyarakat serta mudah diakses dari mana saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Informasi publik sendiri berdasarkan Undang-Undang tersebut berupa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU KIP maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi (selain jenis informasi yang dikecualikan oleh undang-undang). Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyedian, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait pelaksanaan tugas untuk memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan KKP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2021, penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dengan jalan pengisian kuisioner oleh Badan Publik target kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dimana di dalam kuisioner terdapat lima indikator yang menjadi dasar penghitungan nilai dan kategorisasi tingkat keterbukaan Badan Publik, yaitu:

a. Indikator pengembangan website,
b. Indikator pengumuman informasi publik,
c. Indikator pelayanan informasi publik,
d. Indikator penyediaan informasi publik, dan
e. Indikator informasi publik di masa pandemi covid-19.

Kategori nilai hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah:
- Tidak informatif (0-39,9)
- Kurang informatif (40-59,9)
- Cukup informatif (nilai 60-79,9),
- Menuju informatif (80-89,9), dan
- Informatif (90-100).

Pengisian kuisioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 menggunakan aplikasi Monev Elektronik yang dikembangkan oleh KIP dan dilakukan pada triwulan IV tahun 2021. Setiap jawaban dari pertanyaan pada kuisioner harus dilengkapi dengan bukti berupa link dan atau dokumen yang relevan dan masih berlaku.
Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tahun 2021 berdasarkan kategori badan publik, KKP berhasil meraih kategori informatif untuk badan publik kementerian negara dengan nilai sebesar 96,00. Dengan target IKU sebesar 85 maka capaian IKU ini adalah:

(96,00 / 85) x 100% = 112,94%.

Jika dibandingkan dengan realisasi IKU yang sama pada tahun 2020 maka mengalami peningkatan yaitu dari 92,08 menjadi 96,00. Akan tetapi, untuk capaian mengalami sedikit penurunan yaitu dari 113,68% menjadi 112,94. Adapun penyebab penurunan capaian adalah karena perubahan besar target yaitu dari 81 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2021. Target ini lebih besar daripada yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Sekretariat Jenderal KKP yaitu sebesar 82 sehingga apabila dibandingkan dengan target rencana strategis maka capaian IKU ini di tahun 2021 adalah 117,07%. Oleh karena itu penurunan capaian dibandingkan tahun 2020 sebetulnya sama sekali tidak memberi pengaruh negatif terhadap keseluruhan kinerja Biro HKLN dalam pemenuhan target IKU ini di tahun 2021 melalui kerja tim yang terarah.

Keberhasilan Biro HKLN dalam mencapai target ini menunjukkan bahwa Biro HKLN berhasil mempertahankan komitmen untuk menjadikan budaya keterbukaan informasi sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Biro HKLN melalui jajaran pejabat dan pegawai substansi hubungan masyarakat sepanjang tahun 2021 telah memberikan jaminan kepada publik bahwa memperoleh informasi adalah amanat undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Biro HKLN senantiasa mengingat bahwa adalah hak semua warga negara untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

IKU ini tidak memiliki standar nasional. Meskipun demikian, berdasarkan nilai yang dirilis dalam berita resmi dan penilaian dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk 20 besar Badan Publik Kategori Kementerian. Meskipun demikian, KKP ke depannya seyogyanya meningkatkan kinerjanya agar mampu menaikkan nilai dan peringkat. Adapun daftar 20 besar Badan Publik kategori Kementerian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Badan Publik	Kulalifikasi	Nilai
1	Kementerian Pertanian	Informatif	99,29
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Informatif	99,21
3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Informatif	98,10
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Informatif	97,76
5	Kementerian Dalam Negeri	Informatif	97,68
6	Kementerian Ketenagakerjaan	Informatif	97,48
7	Kementerian Keuangan	Informatif	97,45
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Informatif	97,40
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Informatif	97,27
10	Kementerian Luar Negeri	Informatif	97,25
11	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informatif	97,20
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Informatif	97,20
13	Kementerian Koordinator Kemaritiman	Informatif	97,03
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Informatif	96,00
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Informatif	95,88
16	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Informatif	94,71
17	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Informatif	93,49
18	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Informatif	93,39
19	Kementerian Perdagangan	Informatif	93,07
20	Kementerian Perhubungan	Informatif	92,97

Tabel 14 Daftar 20 Besar Badan Publik Kategori Kementerian dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Pusat

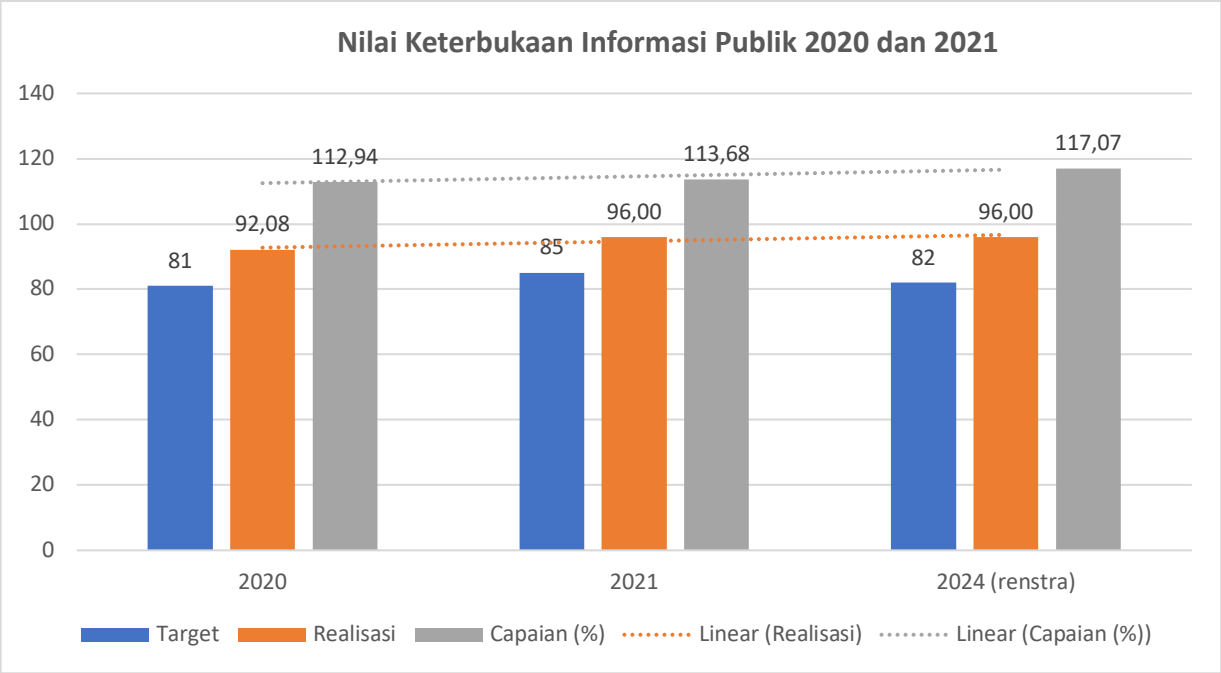

Grafik 4 IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik Biro HKLN tahun 2020 dan 2021

Gambar 4 Wakil Presiden RI Menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 secara simbolis melalui konferensi video

IKU 5: Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
90%	105,71%	117,45%	90%	102,82%	114,24%	90%	Nihil	112,42%

Tabel 15 Ringkasan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	90	143,2	90	112,42	90	102,82

Tabel 16 Informasi besar target dan realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama pada lima tahun terakhir

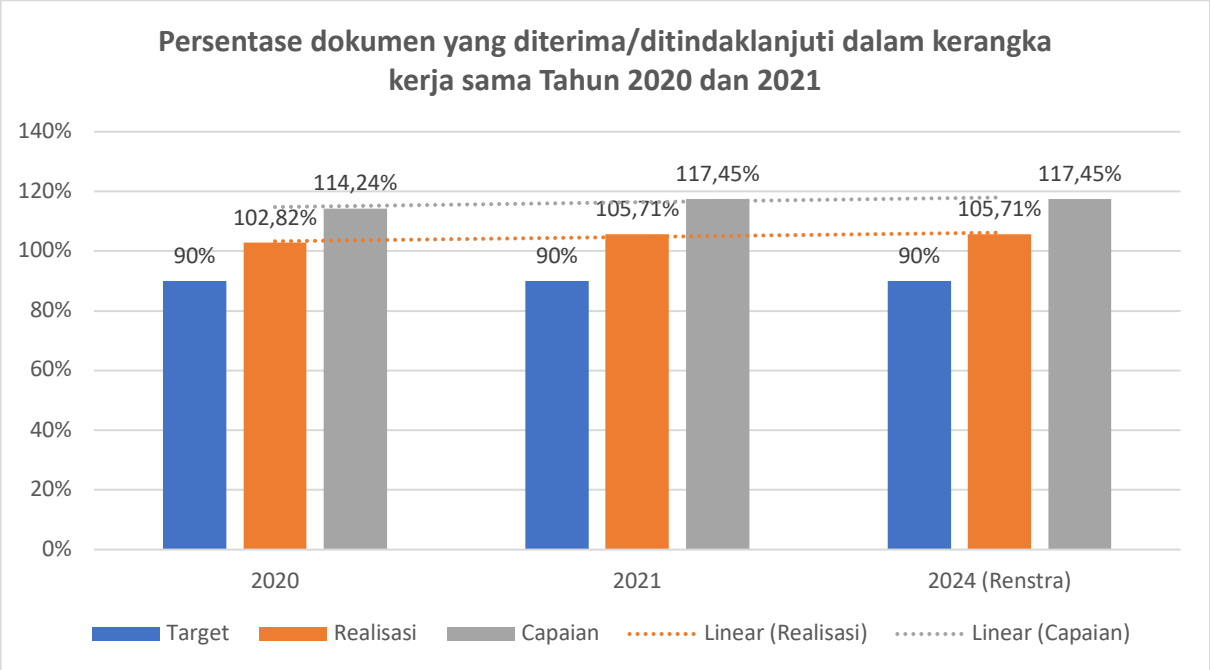

Grafik 5 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2020 dan 2021

Pada kedua tabel dan grafik di atas terlihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama persentase dokumen yang diterima/ ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 105.71%. Dengan demikian realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Biro HKLN untuk triwulan terakhir 2021 yaitu sebesar yaitu 90%. Dari perspektif internal Biro HKLN, keberhasilan dalam pemenuhan target IKU ini sepanjang tahun 2021 terutama disebabkan oleh perencanaan dan pengawasan kinerja berjalan dengan efektif dan dilaksanakan secara berkala sehingga senantiasa terpantau baik oleh pimpinan. Apabila menggunakan target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17/KEP-SJ/2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024) maka besarnya adalah 90% sehingga capaian IKU ini sebesar 117,45%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV 2020 untuk IKU yang sama, maka pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 102,82% menjadi 105,71% sehingga berimplikasi terhadap peningkatan capaian dari 114,24% menjadi 117,45%. Peningkatan realisasi dan capaian IKU ini diperkirakan karena jumlah dan dinamika kegiatan dalam hubungan internasional di bidang kelautan

dan perikanan pada sepanjang tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 karena tahun 2021 adalah tahun ke-2 pandemi Covid-19 dimana kegiatan-kegiatan kerja sama luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang pada tahun 2020 terpaksa dihentikan atau ditunda dapat diteruskan di tahun 2021. Beberapa negara mitra kerja sama bilateral dan organisasi kerja sama regional dan multilateral dalam bidang kelautan dan perikanan mulai membuka kesempatan dan menurunkan persyaratan kesehatan bagi banyak negara untuk mengirimkan delegasinya mengikuti dan berpartisipasi dalam forum-forum kerja sama luar negeri.

Pada tahun 2021, beberapa kegiatan kerja sama luar negeri bilateral, regional dan multilateral yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian diantaranya adalah:

a. Penyampaian kertas posisi RI pada 14th Sherpa Meeting High Level Panel Sustainable Ocean Economy,
b. Penyampaian kertas posisi RI pada Special Virtual BIMP-EAGA Fisheries Working Group Meeting,
c. Penyampaian kertas posisi delegasi RI pada The Forty-Second Meeting of The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (PrepSOM – 42nd AMAF), dan
d. ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Fisheries, 2021-2025 Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Toward 2030

Kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan IKU ini sepanjang tahun 2021 masih seputar dampak dari pandemi global penyakit coronavirus sehingga pada hubungan bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara mitra kerja sama di sektor Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Asia Pasifik yaitu negara Selandia Baru, Papua Nugini, Viet Nam dan Fiji tidak bisa diperoleh implementasi atau tindak lanjut atas kesepakatan kerja sama yang ada. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri melalui Biro HKLN siap untuk melakukan tindak lanjut dari kesepakatan yang tertuang di dalam MoU dengan ke-4 negara tersebut. Akan tetapi, sampai akhir triwulan 4 tahun 2021 belum dapat mengimplementasikan komitmen dikarenakan faktor pandemi dan skala prioritas kegiatan kerja sama luar negeri di negara-negara tersebut.

Capaian IKU ini diperoleh dari rata-rata capaian substansi Sama Bilateral dengan substansi-substansi lingkupnya yaitu substansi Kerja Sama Amerika Eropa, substansi Kerja Sama Asia Pasifik dan substansi Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah dan substansi Kerja Sama Regional dengan substansi-substansi lingkupnya yaitu substansi Kerja Sama Regional, substansi Kerja Sama Intrakawasan dan substansi Kerja Sama PBB. Adapun detil capaian seluruh substansi dapat dilihat dalam 2 tabel di bawah ini.

No	Substansi	Akumulasi Realisasi s.d. Tw IV (diterima/tindak lanjut)	∑ Kerja Sama Aktif	Persentase (akumulasi : ∑KS aktif) x 100%
1	KS Amerop	11	11	100,00%
2	KS Aspas	9	13	69,23%
3	KS Aftimteng	4	4	100,00%
4	KS Intrakawasan	7	5	140,00%
5	KS PBB	11	10	110,00%
				Rata-rata = 102,82%

Tabel 17 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Akumulasi Realisasi}}{\text{Jumlah Kerja Sama Aktif}} = \text{Rata-rata persentase} = 105{,}71\%$$

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} : \text{Target} = 105{,}71 : 90 = 117{,}45\%$$

Daftar realisasi IKU per substansi:

No	Substansi	Kegiatan realisasi	Mitra	Bulan
1	KS Amerop	Penyusunan dan penandatanganan naskah Grant Implementation Agreement (GIA) relating to Implementation of Marine and Fisheries Portfolio antara KKP dan USAID Indonesia	USAID	Februari
2	KS Amerop	Penyelesaian penandatanganan naskah Grant Agreement (GA) on the Fleming Fund Partnership for Antimicrobial Resistance Control on Aquaculture in Indonesia antara KKP dan DHSC Inggris	Inggris	Maret
3	KS Amerop	Online webinar "Cutting Climate and Disaster Risk Insurance Cost via Risk Reduction" tanggal	Jerman	Maret
4	KS Amerop	Pertemuan virtual tanggal 26 Maret 2021 antara Pusriskan dan IRD guna mendiskusikan rencana penyusunan perjanjian transfer dana hibah kegiatan Sustainable Management of FADs and Tropical Tuna Fisheries in Indonesia and the Indian Ocean. Komunikasi intensif antar peneliti Pusriskan dan IRD terkait rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2021 termasuk diantaranya rencana kunjungan lapang peneliti IRD tentatif akan dilaksanakan pada Juni 2021, jika mungkin.	Perancis	Maret
5	KS Amerop	Rapat Koordinasi Interkem Lanjutan Persiapan Pertemuan Konsultasi Tingkat Ahli (PKTA) Bidang Pertanian dan Perikanan antara Repblik Indonesia dan Rusia	Rusia	Juni
6	KS Amerop	Draf Plan Of Action for the Implementation of MoU on Fisheries and Aquaculture Cooperation between Indonesia and Chile	Chile	Mei
7	KS Amerop	Technical Arrangement (TA) kegiatan Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (SMADI) Project, kerja sama antara DJPB KKP dengan Pemerintah Norwegia	Norwegia	Juni
8	KS Amerop	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Kemaritiman RI-Belanda	Belanda	Agustus
9	KS Amerop	Menginisiasi pembahasan mengenai rencana kelanjutan kerja sama perikanan dan budidaya KKP-Hongaria.	Hongaria	November
10	KS Amerop	KKP, diwakili oleh Ditjen Perikanan Budidaya, dalam proses menyusun draf perjanjian (agreement) untuk kegiatan kunjungan (site visit) konsultan Oceanic Institute of Hawai'i Pacific University ke Indonesia.	Oceanic Institute of Hawai'i Pacific University	Desember
11	KS Aspas	Grant Agreement for the Programme for the Development of Fisheries Sector in Outer Islands (Phase 2) between JICA and the MMAF of RI	Jepang	Februari
12	KS Aspas	Penyampaian Laporan Rapat Pembahasan Draf Mutual Recognition Agreement (MRA) RI-Australia	Australia	Juni
13	KS Aspas	First Indonesia-Bangladesh Foreign Office Consultation (FOC) in Jakarta	Bangladesh	April
14	KS Aspas	Koordinasi Pembahasan Perkembangan MoU Antara RI Brunei Darussalam Dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Joint Commission for Bilateral Cooperation Tahun 2021	Brunei Darussalam	April
15	KS Aspas	Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Ministry of Ocean and Fisheries Korea Selatan tentang Kerja Sama di Bidang	Korea Selatan	Mei

		Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja bagi Awak Kapal Perikanan yang Bekerja di Kapal Ikan Pesisir Korea Selatan		
16	KS Aspas	Pembahasan Rencana Kerja Sama Kemaritiman antara Indonesia-Sri Lanka	Sri Lanka	April
17	KS Aspas	Rapat Pembahasan MSP Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Republik Demokratik Timor Leste	Timor Leste	April
18	KS Aspas	Permohonan Masukan/Tanggapan dan koordinasi internal KKP atas Draf MoU Kerja Sama Perikanan dan MoU Kerja Sama Kelautan RI-Republik Rakyat Tiongkok	RRT	Mei
19	KS Aspas	Penyampaian Tanggapan atas Naskah Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-India	India	Juli
20	KS Aftimteng	Rapat Koordinasi Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Expo 2020 Dubai yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves	PEA	Januari
21	KS Aftimteng	Rapat Internal Evaluasi Kerja Sama RI-Mozambik dan Pembahasan Usulan Perpanjangan Masa Berlaku MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Mozambik	Mozambik	April
22	KS Aftimteng	Rapat Interkementerian Evaluasi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Namibia	Namibia	Mei
23	KS Aftimteng	Rapat Interkementerian Pembahasan Draf MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Kuwait	Kuwait	Mei
24	KS Regional	Pertemuan the 3rd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU	ASEAN	Februari
25	KS Regional	Fisheries WG Mini Strategic Planning Meeting in Jakarta	ASEAN	Maret
26	KS Regional	HoD Notes dan Kertas Posisi the 53rd Meeting of SEAFDEC Council	SEAFDEC	April
27	KS Regional	Kertas Posisi Pertemuan the 11th ASEAN Shrimp Alliance	ASEAN	Juni
28	KS Regional	HoD Notes Pertemuan the 13th ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF),	ASEAN	Juni
29	KS Regional	HoD Notes Pertemuan the 29th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi)	ASEAN	Juni
30	KS Regional	Kertas Posisi RI pada the 28th Meeting of the Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme, 15 Juli 2021		Juli
31	KS Regional	Kertas Posisi 8th BIMP EAGA Agribusiness and BIMP EAGA Vision 2025 Mud-Term Review, 15 Agustus 2021	BIMP EAGA	Agustus
32	KS Regional	Penyampaian proposal BIMP-EAGA: Small Busines in Aquaculture for Community Welfare, 16 Agustus 2021	BIMP EAGA	Agustus
33	KS Regional	Kertas Posisi Delegasi RI pada The Twenty-fourth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP)	ASEAN	November
34	KS Regional	Kertas Posisi Forty-Fourth Meeting of the Program Committee of SEAFDEC	SEAFDEC	November
35	KS Regional	Questionnaire of Implementation Status, Way Forward and Self-Evaluation Score of the "ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain"	ASEAN	November
36	KS PBB	Posisi Indonesia pada Audiensi Sekretariat High Level Panel for A	SHERPA	Januari

		Sustainable Ocean Economy dengan Sherpa Indonesia		
37	KS PBB	Posisi Indonesia pada Sub-Committee: Human Element, Training and Watchkeeping (HTW-7)	SHERPA	Februari
38	KS PBB	Kertas Posisi Indonesia the 35th General Meeting on International Coral Reef Initiative	CTI	Februari
39	KS PBB	Kertas Posisi Indonesia pada Sidang COFI ke-34	COFI	Februari
40	KS PBB	Kertas Posisi RI pada 17th Sherpa Meeting,	SHERPA	Februari
41	KS PBB	Kertas Posisi RI pada 18th Sherpa Meeting	SHERPA	Maret
42	KS PBB	Kertas Posisi RI pada Sidang APFIC 36	APFIC	Mei
43	KS PBB	Kertas Posisi RI pada Sidang 3rd Meeting of PSMA	PSMA	Mei
44	KS PBB	Kertas Posisi RI pada Sidang Intergovernmental Technical Working Group on Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture	FAO	Juni
45	KS PBB	Kertas Posisi RI pada The first meeting of the ad hoc Working Group on the future of Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC)	APFIC	Agustus
46	KS PBB	Kertas Posisi RI pada The 2nd Meeting of the Working Group (WG2) on the Proposal of the Establishment of the Sub-Committee on Fisheries Management	FAO	September

Tabel 18 Daftar realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama Tahun 2021 berdasarkan kelompok substansi

Status implementasi/tindak lanjut atas kerja sama aktif pada setiap subbagian di Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan akhir tahun 2021 dielaborasi dalam tabel di bawah ini.

No	Subbagian	Kerja Sama Aktif		Status Kerja Sama s.d. Tw IV 2021
1	Kerja Sama Amerika Eropa	1	KKP-AS (GIA USAID)	Sudah ada tindak lanjut
		2	KKP-Oceanic Institute of Hawai'i Pacific University (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		3	KKP-Belanda (MoM SWGMAF)	Sudah ada tindak lanjut
		4	KKP-Inggris (GA DHSC)	Sudah ada tindak lanjut
		5	KKP-Rusia (MoM WGMAF)	Sudah ada tindak lanjut
		6	KKP-Jerman (TA GIZ RFPI)	Sudah ada tindak lanjut
		7	KKP-Hongaria (MoU)	Sudah ada tindak lanjut
		8	KKP-Chile (MoU)	Sudah ada tindak lanjut
		9	KKP-Norwegia (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		10	KKP-Prancis (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
		11	KKP-Monako (LoI)	Sudah ada tindak lanjut
2	Kerja Sama Asia Pasifik	1	Kerja sama bilateral RI-Australia	Sudah ada tindak lanjut
		2	Kerja sama bilateral RI-Bangladesh	Sudah ada tindak lanjut
		3	Kerja sama bilateral RI-Brunei Darussalam	Sudah ada tindak lanjut
		4	Kerja sama bilateral RI-Fiji	Belum
		5	Kerja sama bilateral RI-India	Sudah ada tindak lanjut
		6	Kerja sama bilateral RI-Jepang	Sudah ada tindak lanjut
		7	Kerja sama bilateral RI-Korea Selatan	Sudah ada tindak lanjut
		8	Kerja sama bilateral RI-Papua Nugini	Belum
		9	Kerja sama bilateral RI-Republik Rakyat Tiongkok	Sudah ada tindak lanjut
		10	Kerja sama bilateral RI-Selandia Baru	Belum
		11	Kerja sama bilateral RI-Sri Lanka	Sudah ada tindak lanjut
		12	Kerja sama bilateral RI-Timor Leste	Sudah ada tindak lanjut
		13	Kerja sama bilateral RI-Viet Nam	Belum

3	Kerja Sama Afrika Timur Tengah	1	Kerja sama bilateral RI-Arab Saudi	Sudah ada tindak lanjut
		2	Kerja sama bilateral RI-Maroko	Sudah ada tindak lanjut
		3	Kerja sama bilateral RI-Persatuan Emirat Arab (PEA)	Sudah ada tindak lanjut
		4	Kerja sama bilateral RI-Kuwait	Sudah ada tindak lanjut
4	Kerja Sama Regional	9	Keanggotaan RI dalam organisasi regional ASEAN, SEAFDEC, RFMO, NACA, BIMP-EAGA, IMT-GT, RPOA-IUU dan RCEP	12 dokumen yang diterima dalam forum regional dari 9 yang direncanakan
5	Kerja Sama PBB	10	Keanggotaan RI dalam PBB dan organisasi di terkait lainnya yaitu FAO, IMO, CTI dan UFCCC	11 dokumen yang diterima dalam forum PBB dan organisasi terkait dari 10 yang direncanakan

Tabel 19 Status realisasi IKU Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti

Hal-hal yang menyebabkan realisasi IKU ini sebesar 105,71% sehingga melampaui target akhir 2021 kendati masih harus menghadapi kendala pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa dan Afrika Timur Tengah dan kerja sama multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Regional berjalan sesuai dengan jadwal indikatif penyelenggaraannya pada triwulan IV 2021 melalui pertemuan yang dilakukan secara virtual dan juga melalui tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
2. Pelaksanaan rencana kegiatan kerja sama luar negeri hingga akhir tahun 2021 bisa tepat atau tidak meleset jauh dari jadwal yang sudah disusun karena setelah setahun sejak mewabbahnya covid-19 di seluruh dunia, Indonesia bersama dengan negara dan organisasi regional dan internasional mitra kerja sama sektor kelautan dan perikanan sudah memiliki langkah taktis yang memungkinkan kegiatan kerja sama luar negeri terselenggara dengan tepat waktu yaitu melalui pertemuan virtual. Akibatnya, keikutsertaan KKP melalui Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina kerja sama luar negeri di lingkup KKP khususnya pada kegiatan yang membutuhkan kehadiran langsung Biro HKLN untuk pendampingan terhadap beragam kegiatan kerja sama Amerika Eropa, Afrika Timur Tengah, PBB dan Regional dapat dijamin.
3. Posisi KKP melalui Biro HKLN dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di tingkat bilateral, regional dan internasional tetap strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan oleh partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan dalam kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, Afrika TIimur Tengah, PBB dan Regional Biro HKLN selalu mendapat sambutan dan tanggapan positif dari negara mitra Indonesia dan organisasi kerja sama kelautan dan perikanan regional dan internasional dimana KKP menjadi anggotanya.

Rencana ke depan:

1. Koordinator dan subkoordinator substansi semua kerja sama agar terus mengupayakan semaksimal mungkin terselenggaranya implementasi/tindak lanjut kerja sama di tahun anggaran 2022 untuk seluruh bidang dan ruang lingkup yang disepakati dalam kerja sama bilateral, kerja regional dan multilateral.
2. Seluruh koordinator dan subkoordinator substansi Kerja Sama Bilateral dan substansi Kerja Sama Regional dan Multilateral agar tetap menjaga keproaktifan menindaklanjuti setiap kerja sama aktif bilateral, regional dan multilateral dan memastikan setiap usul dalam kertas posisi Indonesia yang diperjuangkan diterima dalam forum-forum kerja sama memberikan benefit seluas mungkin kepada sektor kelautan dan perikanan dalam negeri.

3. Tingkat penyerapan anggaran untuk substansi kerja sama luar negeri/internasional berhasil melampaui 95% di akhir triwulan IV tahun 2021. Oleh karena itu diharapkan agar setiap koordinator dan subkoordinator turut mempertahankan keberhasilan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang direncanakan untuk terlaksana sebagai komponen pencapaian IKU ini pada tahun anggaran 2022 supaya penyerapan anggaran sebisa mungkin kembali lagi mendekati 100%.
4. Subkoordinator Tata Usaha akan kembali senantiasa memantau perkembangan kegiatan dan realisasi IKU ini di seluruh triwulan pada tahun 2022 sehingga semua target kembali tercapai.

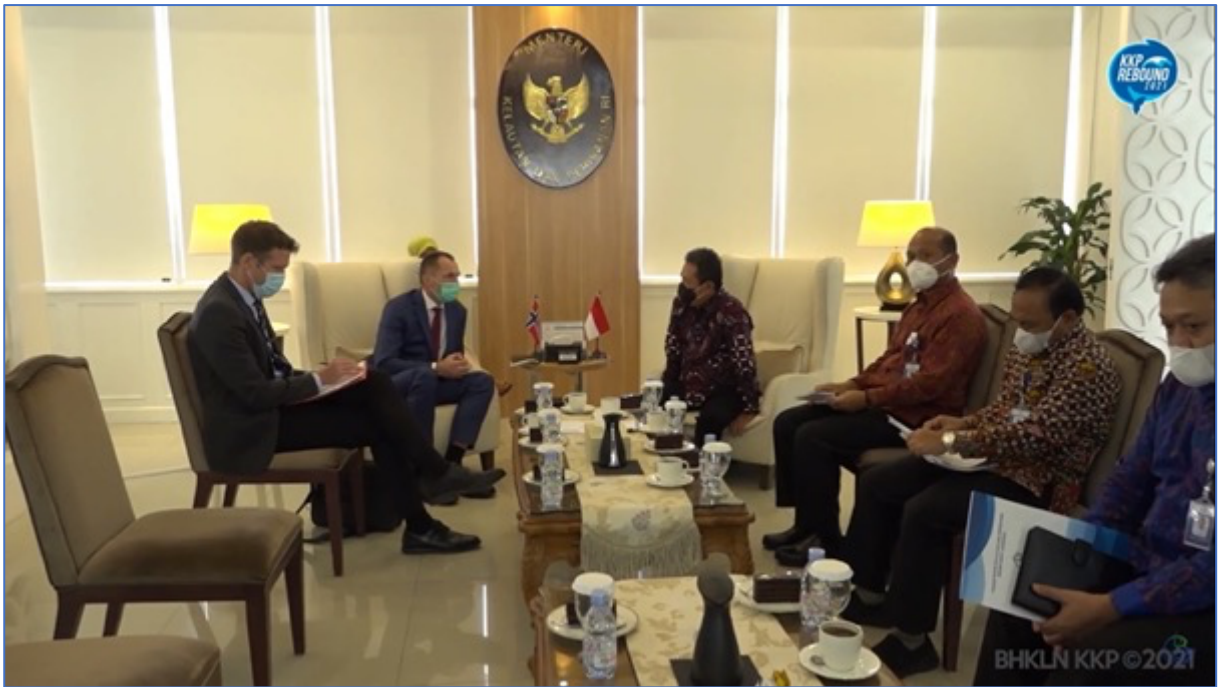

Gambar 5 Menteri KP Menerima kunjungan Duta Besar Norwegia Dalam Rangka Koordinasi dan Peningkatan Kerja Sama dalam Sektor Kelautan dan Perikanan

IKU 6: Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang ektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. IKU Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan adalah persentase berita dengan sentiment atau tendensi atau *tone* netral dan positif tentang sektor kelautan dan perikanan yang dihadirkan melalui media massa dalam dalam bentujk *online*, cetak dan audio visual dalam kurun periode tertentu yaitu triwulan dan tahun. Secara langsung dan tidak langsung IKU ini memberi Kementerian Kelautan dan Perikanan informasi, sebagai salah satu instansi pemerintah pusat yang menelurkan kebijakan-kebijakan dalam sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat, mengenai status citra dan penilaian pers, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai kontrol sosial, atas kondisi lapangan di sektor kelautan dan perikanan yang terekam dan terpublikasi melalui media.

Implementasi IKU ini merupakan salah satu wujud KKP melalui Biro HKLN sebagai unit kerja pembina dan penyedia pelayanan penerangan masyarakat dan komunikasi publik untuk sektor kelautan dan perikanan, dalam mendukung Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Undang-Undang tersebut termaktub amanat untuk membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebelumnya, pada tahun 2016 sampai dengan 2019, Biro HKLN menanggungjawabi IKU 'Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang KKP' namun berdasarkan arahan pimpinan, maka sejak tahun 2020 Biro HKLN mengganti IKU menjadi 'Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan' yang dihasilkan dari *cascading* IKU Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan yang ditanggungjawabi oleh Sekretaris Jenderal, sehingga ruang lingkup berita yang termasuk ke dalam pengukuran berubah dari KKP menjadi sektor kelautan dan perikanan. Rekapitulasi hasil dan analisis pengukuran IKU 'Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan' pada tahun 2021 dan tahun 2020 serta beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini:

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
>86%	99,17%	113,28%	>85%	84,65%	99,59%	>81%	nihil	110,26%

Tabel 20 Ringkasan Capaian IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	>85%	84,65%

Tabel 21 Informasi target dan Realisasi IKU Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan tahun 2016-2020

Dalam kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi IKU rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan pada akhir tahun/tahun 2021 adalah 99,17% sehingga Biro HKLN berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu lebih besar dari pada 86%. Capaian IKU adalah 113,28%, diperoleh dari penghitungan berikut:

Capaian = (1 + (1 - (target / realisasi)) x 100% = (1 + (1 – (86 / 99,17)) x 100% = 113,28%

Target pada tiap-tiap triwulan sepanjang tahun target 2021 untuk IKU ini juga lebih besar daripada 86% dan sepanjang tahun 2021 Biro HKLN selalu berhasil memenuhi target. Pada akhir akhir tahun/tahun 2020, realisasi IKU yang sama adalah 84,65%. Hal ini berarti bahwa berita yang isinya mencakup sektor kelautan dan perikanan yang dipublikasikan lewat media online, media cetak dan media audio visual (TV), 84,65 persen diantaranya memiliki nuansa atau *tone* yang bersifat netral dan positif. Terjadi perubahan besar persentase berita dengan tone/nuansa netral dan positif dari akhir tahun 2020 ke akhir tahun 2021 yaitu dari 84,65% menjadi 99,17%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang membaik secara signifikan karena persentase atau rasio berita positif turun drastis dari 84,65% menjadi 99,17%.

Target IKU Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan di tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal adalah >89%. Dengan demikian, jika berpatokan kepada target akhir jangka menengah tahun 2020-2024 maka realisasi akhir tahun 2021 berada dalam posisi yang berada di dalam rentang target sehingga capaiannya sebesar 110,26%. Persentase realisasi IKU akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun akhir tahun 2024/target tahun terakhir dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 diperoleh dengan cara penghitungan sebagai berikut:

Capaian = (1 + (1 - (target / realisasi)) x 100% = (1 + (1 – (89 / 99,17)) x 100% = 110,26%

Untuk IKU ini tidak tersedia standar nasional sehingga tidak bisa dilakukan pembandingan yang dapat dikembangkan hingga analisis dan evaluasi atas realisasi IKU ini pada triwulan tahun 2021 terhadap standar nasional (atau internasional).

Dengan diperolehnya realisasi IKU Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan tahun 2021 sebesar 99,17% sehingga capaiannya menjadi 113,28% maka dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan Biro HKLN yang terkait secara langsung dan tak langsung yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian IKU ini selama tahun 2021 berhasil dilaksanakan. Dipandang dari sudut pandang eksternal, penyebab terutama keberhasilan pemerolehan target IKU ini adalah isu yang bersifat netral dan positif tertuang dalam berita terkait dengan sektor Kelautan dan Perikanan yang dipublikasikan melalui media online, cetak dan audio visual (TV) sangat besar porsinya. Kondisi ini buah dari tiadanya masalah pelik dihadapi KKP beserta seluruh jajarannya sepanjang tahun 2021. Berbeda dengan tahun 2020 dimana menjelang penghujung tahun 2020 KKP dikagetkan dengan berita penangkapan Menteri oleh KPK.

Beberapa langlah strategis yang sudah disusun awal 2021 dapat diimplementasikan kepala Biro HKLN dan jajaran Hubungan Masyarakat selama tahun 2021 untuk meningkatkan realisasi IKU ini dibandingkan tahun 2020 dengan baik. Langkah-langkah tersebut adalah:

- Memelihara koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara Biro HKLN dengan pihak eksternal yaitu media cetak dan media online;
- Menjaga hubungan dan komunikasi yang baik serta mengoptimalkan sinergi antara Hubungan Masyarakat Biro HKLN dengan unit kerja di eselon I KKP lainnya yang menangani hubungan masyarakat dan komunikasi publik;

- Melakukan pemantauan secara berkala dan terfokus atas berita-berita yang dipublikasikan oleh media eksternal sehingga Hubungan Masyarakat Biro HKLN dapat melihat bahwa proses jurnalistik yang dilakukan media eksternal cukup berimbang dan objektif;
- Hubungan Masyarakat Biro HKLN sebagai unit kerja pembina unit-unit kerja yang menanggungjawabi komunikasi publik dan hubungan masyarakat unit kerja Eselon I KKP masing-masing Bersama dengan para pejabat fungsional Pranata Hubungan Masyarakat senantiasa mendorong agar para counterpart-nya dan para Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di KKP selalu proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan isu-isu seputar sektor kelautan dan perikanan serta produktif dalam produksi dan mendistribusikan bahan-bahan publikasi mengenai sektor kelautan dan perikanan;
- Biro HKLN mempertimbangkan merumuskan strategi dan intelijen komunikasi, media dan informasi sehingga tim humas Biro HKLN mampu melakukan *forecasting* peluang dan dinamika kemunculan berita netral dan positif dan persentase berita netral dan positif melalui kerja sama dengan ahli atau pakar dan akademisi dalam bidang ilmu komunikasi dan kehumasan dan organisasi rekan Biro HKLN penyedia daftar rekapitulasi berita seputar sektor kelautan dan perikanan;
- Kepala Biro HKLN beserta Koordinator Hubungan Masyarakat dengan seluruh jajarannya selalu memandang penting dan serius serta sigap menyikapi setiap proses klarifikasi dan verifikasi substansi berita yang dipublikasikan oleh media yang dikelola oleh KKP. Media massa online, vetak dan TV yang dimiliki pers sering mengambil atau melakukan *relay* berita dari media yang dikelola oleh KKP sehingga secara tidak langsung dapat memperbesar peluang rasio jumlah berita dengan tone atau sentimen netral dan positif di media eksternal.

Berdasarkan realisasi dan capaian IKU ini tahun 2021, bisa disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan komunikasi publik dan hubungan masyarakat sepanjang tahun 2021 sudah dikelola dengan efektif oleh pimpinan di Biro HKLN melalui Koordinator substansi Hubungan Masyarakat sehingga berhasil memenuhi target IKU Selama tahun 2021, anggaran Biro HKLN mengalami pemotongan (untuk *refocusing* Covid-19), sebagaimana juga di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, terjadi pengurangan pembiayaan kegiatan-kegiatan kehumasan dan komunikasi publik di Biro HKLN. Meskipun begitu, Biro HKLN masih mampu mengoptimalkan bahkan memaksimalkan dana tersisa untuk membangun citra KKP melalui kegiatan-kegiatan Biro HKLN. Optimalisasi selama tahun 2021 terbukti berkontribusi positif terhadap pencapaian target IKU ini sepanjang tahun 2021.

Beberapa program atau kegiatan yang telah direalisasikan oleh Biro HKLN yang dipandang berguna secara langsung atau tidak langsung menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sehingga dapat memenuhi target IKU Rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a. Peliputan dan dokumentasi,
b. Konferensi Pers,
c. Publikasi melalui Media Massa,
d. Pertemuan dengan Pimpinan Media Massa,
e. Forum koordinasi kehumasan,
f. Strategi komunikasi,
g. Journalist briefing, dan
h. Kampanye kebijakan dan capaian sektor Kelautan dan Perikanan,

Dengan adanya program/kegiatan di atas yang sudah diselenggarakan Biro HKLN hingga akhir tahun 2021 dan ditunjang dengan tersedianya sumber daya manusia yang terbukti adalah para profesional, kompeten, loyal, berpengalaman dan berdedikasi dalam disiplin komunikasi publik, kehumasan dan penerangan masyarakat dan dikelola dengan baik oleh Koordinator Hubungan Masyarakat maka setelah menghadapi dan melampaui semua dinamika nasional dalam sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2021, realisasi IKU ini berhasil memenuhi dan melampaui target.

Sebagai catatan tambahan, Biro HKLN menghormati kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 turut menegaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Selain dari upaya dan usaha Biro HKLN yang sudah dikemukakan di atas guna memenuhi target IKU rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan, harus diakui bahwa faktor eksternal turut berperan dalam perolehan realisasi target IKU rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan pada tahun ini citra KKP di media bisa dikatakan berbalik atau *rebound* ditandai dengan realita bahwa berita dengan tone netral dan positif tentang sektor kelautan dan perikanan mendominasi jagad pemberitaan melalui media online, cetak dan audio video/TV.

Pada bulan pertama di triwulan terakhir 2021, dilihat dari jumlah pemberitaan, terdapat 10 besar media yang paling banyak mempublikasikan liputan berita tentang sektor Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

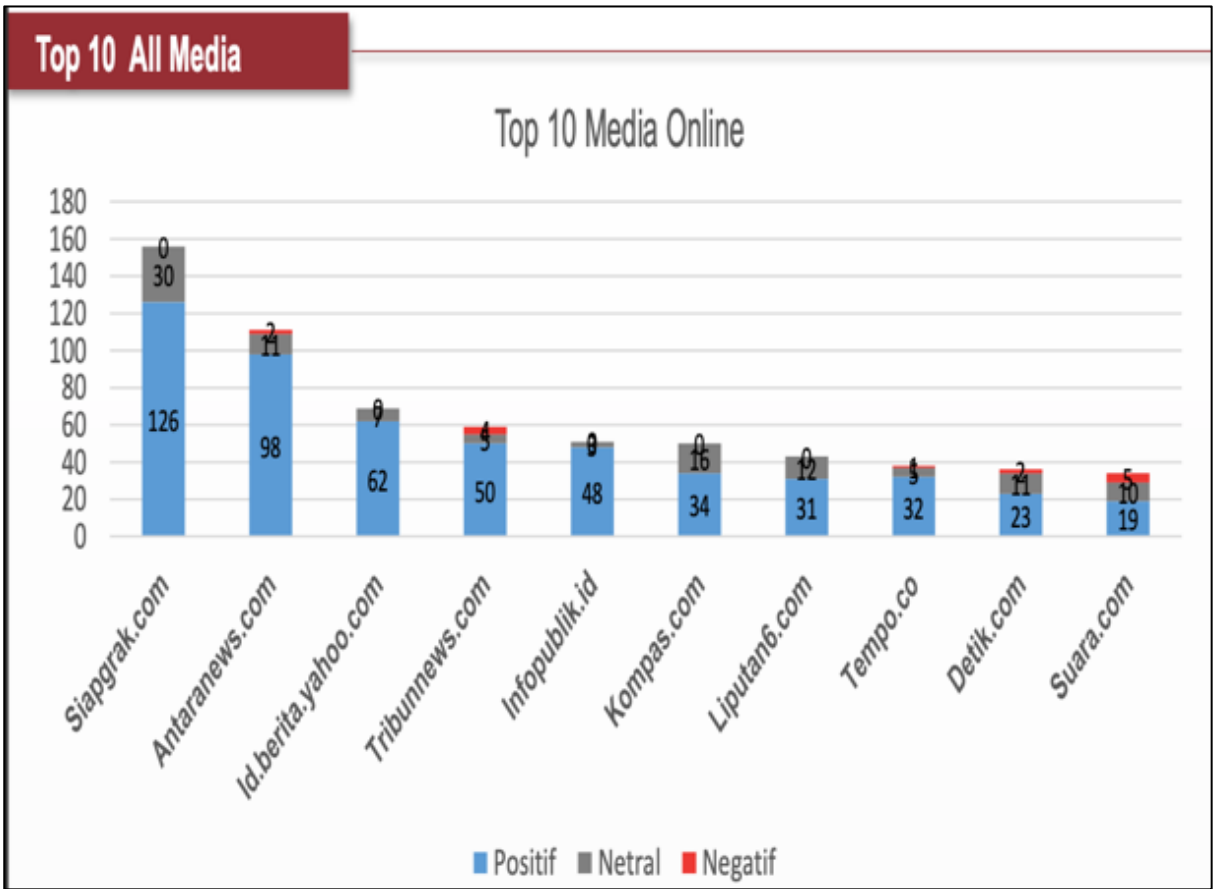

Grafik 6 *Top ten* media penyampai berita sektor kelautan dan perikanan pada September 2021

Isu-isu sektor kelautan dan perikanan yang terbanyak diangkat oleh seluruh media (online, cetak dan TV) di bulan Oktober 2021 yaitu sebagai berikut:

1. KKP Lepas Ekspor 19 ribu Ton Ikan ke 44 Negara (230 berita)
2. KKP Siapkan 4 program untuk Dukung Ekonomi Biru (160 berita)
3. Polemik Tuntutan PP 85 Harus Dicabut (107 berita)
4. KKP Segera Bangun Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Biak (92 berita)
5. Wapres Ma'ruf Amin akan Tutup PON Papua 2021 (81 berita)
6. Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Dukung Budi Daya Udang Vaname di Jembrana (86 berita)
7. KKP Pulangkan Tiga Nelayan Indonesia Yang Tertangkap di Malaysia (80 berita)
8. Penangkapan Ikan Terukur Untuk Keadilan dan Pemerataan Ekonomi (75 berita)
9. Bakamla RI dan 19 Negara Gelar Pemantapan Wawasan Hukum Maritim (75 berita)
10. KKP Maksimalkan Peran Koperasi dalam Mendorong Produktivitas Sektor Perikanan (75 berita)

Di bulan November 2021, terdapat 10 media yang berada di posisi pemuncak dalam jumlah pemberitaan mengenai sektor kelautan dan perikanan. Ke-10 media tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

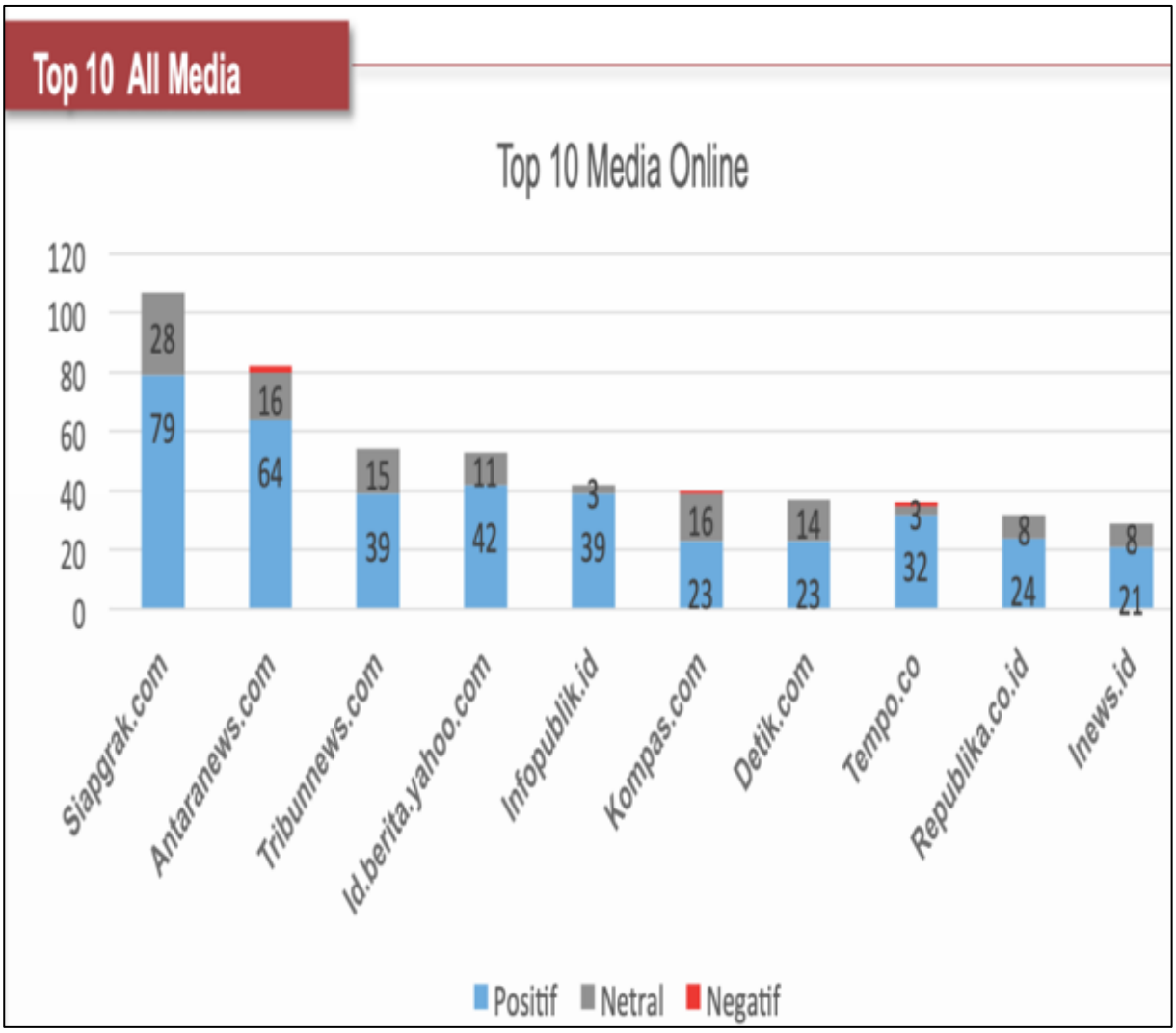

Grafik 7 Sepuluh besar media dalam pemberitaan sektor kelautan dan perikanan pada November 2021

Topik seputar sektor Kelautan dan Perikanan yang mendapat *coverage* terbanyak oleh media sepanjang bulan November 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Ekonomi Biru Tahun 2022, KKP Pastika Pengawasan Terintegrasi (149 berita)
2. Tolok Ukur Komoditas Perikanan Budi Daya RI (140 berita)
3. Sinergitas Antar Lembaga Mudahkan Ekspor Perikanan (94 berita)
4. Penangkapan Ikan Terukur Dorong Perputaran Uang Hingga Rp 281 Trilyun (83 berita)
5. Kunjungan Puan Maharani, Temui Nelayan dan Petani Banyuwangi (71 berita)
6. Bakamla RI: Ancaman di Laut Sulawesi-Sulu Bersifat Non Tradisional (70 berita)
7. Rehabilitasi Mangrove Perlu Upaya Ekstrem (70 berita)
8. Tingkatkan Produksi Udang, KKP Kembangkan Tambak Modern (63 berita)
9. KKP: Kawasan Natuna Strategis Sehingga Perlu Perkuat Pengawasan (58 berita)
10. Antisipasi Kerugian Negara, KKP Ubah Harga Patokan Ikan (57 berita)

Di penghujung tahun 2021 yaitu bulan Desember, 10 media yang menduduki posisi teratas dalam jumlah pemberitaan seputar isu tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

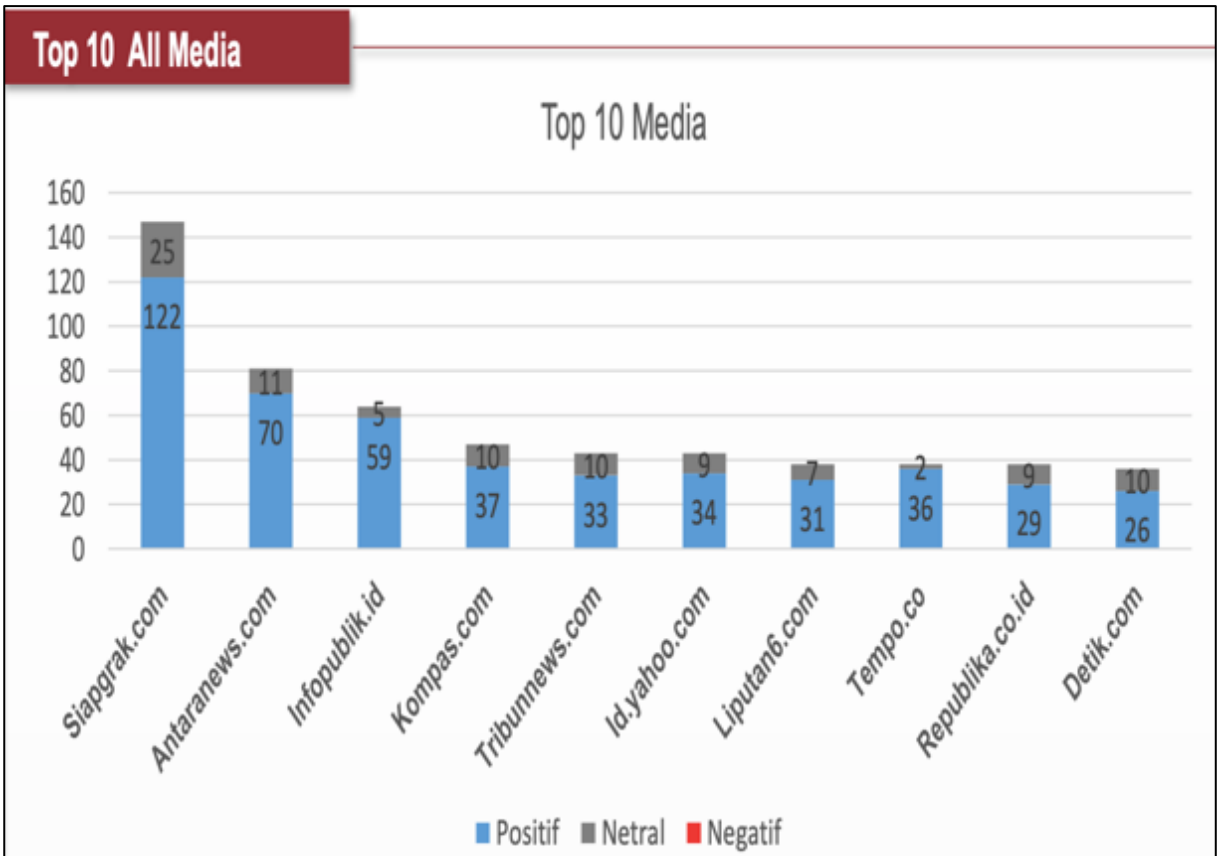

Grafik 8 *Top ten* media dalam pemberitaan sektor kelautan dan perikanan pada Desember 2021

Daftar beberapa topik berita dengan frekuensi tertinggi pemberitaannya oleh semua media sepanjang bulan Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Potensi Budidaya Perikanan Masih Sangat Besar (159 berita)
2. KKP: Ekspor Produk Perikanan Naik 6,6% di 2021 (157 berita)
3. KKP: PNBP Perikanan 2021 hampir capai Rp 1 Trilyun (104 berita)
4. KKP Bagikan Bantuan Kebutuhan Harian Untuk Korban Erupsi Semeru (93 berita)
5. KKP Tangkap 7 Kapal Illegal Fishing, Satu Dari Malaysia (84 berita)
6. XL Axiata Rilis Program Desa Digital Nusantara, Dorong Masyarakat Adopsi Teknologi (82 berita)
7. KKP-SKK Migas Duduk Bareng Bahas Tata Ruang Laut untuk Investasi (77 berita)
8. Strategi KKP Tingkatkan Produksi Tambak Udang 50 Kali Lipat di 2022 (52 berita)
9. KKP Perkenalkan Sistem Kontrak Dalam Kebijakan Penangkapan Terukur (52 berita)
10. KKP Gaungkan Ekonomi Biru di Dubai Expo 2020 (45 berita)

Dapat dikatakan bahwa sepanjang tahun 2021 tidak ditemui kendala mulai dari yang bisa dipandang ringan hingga yang signifikan oleh Biro HKLN selama pelaksanaan IKU di tahun 2021.

Gambar 6 Menteri KP secara mutlak mendukung penuh citra kebijakan KKP yang positif terhadap publik melalui publikasi oleh media

Gambar 7 Peresmian Logo Baru KKP oleh Menteri KP yang diliput dan di-*broadcast* oleh Neptune TV (inovasi baru komunikasi publik KKP yang diluncurkan pada 14 September 2021)

IKU 7: Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Nihil	100%

Tabel 22 Ringkasan Capaian IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 23 Target dan Realisasi IK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro HKLN pada tahun 2016 sampai dengan 2020

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Biro HKLN merupakan pernyataan 42enyusun42nal pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas 42enyus pengendalian internal.

Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Biro HKLN tahun 2020 adalah sebesar 0%. Realisasi ini setara dengan 100% terhadap target tahun 2021 dan 100% berdasarkan aplikasi Kinerjaku. Nilai ini adalah nilai temuan BPK terhadap LHP Biro HKLN tahun anggaran 2020 terhadap realisasi anggaran pada tahun itu yaitu sebesar Rp. 16.234.763.168 dari pagu sebesar Rp. 16.447.994.000,-. Beberapa hal yang sudah dilakukan Biro HKLN sepanjang tahun 2021 dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan tahun 2020 (nihil temuan),
2. Menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah,
3. Menginventarisasi 42enyu,
4. Mereviu laporan keuangan,
5. Menyelesaikan catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi,
6. Perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara,
7. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,
8. Penguatan 42enyus pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan yang bersifat strategis, 42enyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis,
9. Koordinasi dengan Biro Keuangan.

Tidak ada standar nasional untuk IK ini yang bisa dirujuk oleh Biro HKLN untuk menetapkan target. Tetapi di lingkungan KKP diberlakukan target untuk IK ini yaitu sebesar 100%. IK ini ditanggungjawabi oleh semua unit kerja eselon II KKP dan seluruh satuan kerja seperti Balai dan Stasiun.

IKU 8: Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
73	77,53	106,20%	72	54,95	76,32%	76	nihil	102,01%

Tabel 24 Ringkasan Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	71	69,74	72	54,95

Tabel 25 Informasi target dan Realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN 5 tahun terakhir

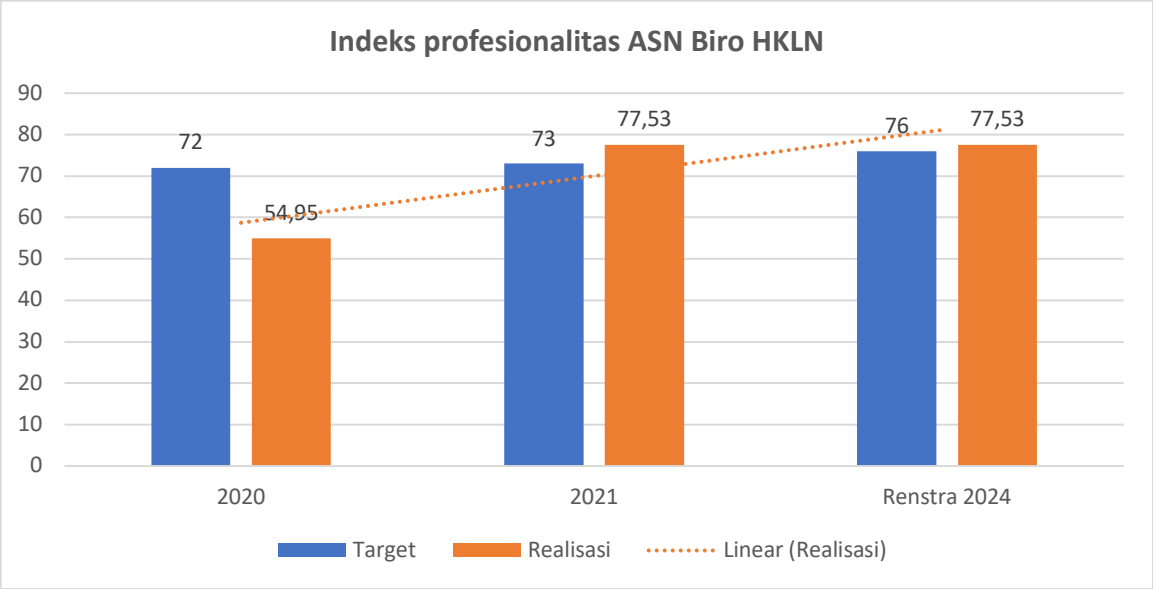

Grafik 9 Perbandingan realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2020, 2021 dan target tahun akhir Renstra 2024

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan mutu ASN berdasarkan kesesuaian, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Peraturan Menteri Pengelolaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya, pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Di dalam peraturan ini, bobot pengukuran diatur sebagai berikut:

a. Dimensi kualifikasi (25%) mengukur kualifikasi Pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai paling rendah,
b. Dimensi kompetensi (40%) mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan,
c. Dimensi kinerja (30%), mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai iserta perilaku PNS, dan
d. Dimensi disiplin (5%) dengan kriteria sebagai berikut:
   - Nilai 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
   - Nilai 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
   - Nilai 2 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
   - Nilai 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil pendataan ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Meskipun begitu, karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut maka untuk tahun 2019 pengukuran Indeks Profesionalitas menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks Profesionalitas ASN nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi (91-100) sampai dengan sangat rendah (0-60).

Untuk penghitungan IKU Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2021, sumber data hasil pengukuran IKU berasal dari beberapa sumber tervalidasi yaitu:

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di-*update* pada aplikasi SIMPEG *online* KKP,
b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Perhitungan nilai Diklat Pimpinan, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat Pimpinan, sesuai dengan level kelas jabatan terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total, bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 1 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 1 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.
c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
c. Nilai 71-80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
d. Nilai 61-70 berkategori Rendah (Cenderung tidak professional;
e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesiona).

Realisasi IKU IP ASN Biro HKLN tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat dalam 2 tabel di atas dan realisasi tahun 2021 adalah sebesar 77,53. Dengan target sebesar 73 maka capaiannya adalah 106,20%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2021 Biro HKLN akhirnya dapat memenuhi target IKU ini setelah 2 tahun sebelumnya berturut-turut belum tercapai. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU yang sama di tahun 2020 maka Biro HKLN mengalami kenaikan dari segi realisasi dan capaian. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 76 maka capaian IKU ini di tahun 2021 sebesar 102,01% karena sudah melampauinya. Hal ini juga berarti bahwa kerja keras Biro HKLN untuk memperbaiki capaian dan realisasi pada tahun 2021 yang sebesar 73 akhirnya tercapai. Tidak ada referensi tentang adanya standar nasional untuk IKU ini.

Jika dirinci kepada level komponen, realisasi IP ASN Biro HKLN terdiri dari 4 komponen yaitu:

- Kualifikasi (bobot 25) = 15,52
- Kompetensi (bobot 40) = 31,88
- Kinerja (30) = 25,12
- Disiplin (5) = 5

Nilai IP ASN Biro HKLN termasuk kategori sedang sehingga untuk tahun 2022 sehingga dipandang mendesak untuk melakukan upaya perbaikan yang lebih serius seihngga naik menjadi kategori tinggi. Pada tahun 2021 Biro HKLN telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Pemutakhiran data Pendidikan dan pencantuman gelar serta input data pendidikan formil dari pegawai yang sudah menyelesaikan tugas dan izin belajar melalui aplikasi epegawai.kkp.go.id masing-masing pegawai,
b. Meningkatkan nilai kompentensi melalui partisipasi kegiatan diklat secara virtual sambal memastikan agar pegawai mengikuti seminar yang terkait dengan bidang tugasnya dan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi epegawai.kkp.go.id masing-masing pegawai,
c. Meningkatkan nilai kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai perilaku kerja dengan hasilnya berbentuk penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP), dan
d. Peningkatan disiplin pegawai.

Kendala Biro HKLN dalam pencapaian target IK ini di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Untuk nilai kompetensi
   - Tidak adanya pelatihan Diklatpim karena masa pandemi covid-19 yang belum berakhir,
   - Pelatihan dengan ketentuan tercapainya Jam Pelatihan sebanyak 20 JP sulit dilakukan oleh pegawai dengan berbagai pertimbangan seperti pembiayaan, kesibukan dan pandemic covid 19,
   - Terbatasnya seminar yang relevan dengan tugas dan fungsi pegawai Biro HKLN,
b. Untuk nilai disiplin Pada tahun 2021 dengan target 73 (kategori sedang) sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, komponen perhitungan Diklat Teknis 20 JP dan Seminar, yaitu Diklat Teknis 20 JP dihitung 1 (satu) tahun terakhir dan Seminar dihitung 2 (dua) tahun terakhir.

Sehubungan dengan semakin tingginya target IK ini pada tahun 2022 mendatang, maka direncanakan beberapa langkah berikut oleh Biro HKLN, yaitu:

a. Melakukan pemutakhiran data Pendidikan terakhir untuk meningkatkan aspek kualifikasi,
b. Mengusulkan pejabat yang belum mengikuti diklat fungsional khususnya yang telah menduduki jabatang fungsional tertentu,
c. Mengusulkan penyelenggaraan pelatihan secara virtual melalui aplikasi e-learning,
d. Mengusulkan tugas dan izin belajar ke Badan RSDMKP,
e. Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai, dan
f. Penerapan hukuman disiplin bagi pegawai

Tidak terdapat standar nasional yang dapat dijadikan acuan menetapkan target IKU ini. Di lingkup Sekretariat Jenderal, berdasarkan besar IP ASN, posisi Biro HKLN bukan di tempat terendah meskipun tidak meraih nilai terbesar (Tabel 26). Dalam tabel di bawah, dapat kita lihat rekapitulasi nilai IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal akhir tahun 2021.

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	*23,33*	*20.00*	*28,33*	*5,00*	*76,67*
2	Biro Perencanaan	*16,35*	*37,31*	*25,19*	*5,00*	*83,85*
3	Biro Keuangan	*14,29*	*30,56*	*25,00*	*5,00*	*74,85*
4	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	*13,66*	*31,31*	*25,17*	*5,00*	*75,14*
5	Biro Hukum	*16,50*	*35,83*	*24,70*	*5,00*	*82,03*
6	Biro HKLN	*15,52*	*31,88*	*25,12*	*5,00*	*77,53*
7	Biro Umum dan PBJ	*11,99*	*38,90*	*24,85*	*4,99*	*80,72*
8	Pusdatin	*14,45*	*39,45*	*26,45*	*5,00*	*85,36*
	Rata-rata	***15,76***	***33,15***	***25,60***	***5,00***	***79,52***

Tabel 26 Target dan Realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN tahun 2016 s.d. 2020

Gambar 8 Menteri KP Memberi Perhatian Penuh Kepada Pembangunan Profesionalisme ASN KKP

IKU 9: Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
84%	93,98%	111,88%	82%	100%	125%	90%	Nihil	%

Tabel 27 Ringkasan Capaian IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
50	56,32	65	35	66	98,89	80	100	82	100

Tabel 28 Informasi target dan realisasi IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen tahun 2016 sampai tahun 2020

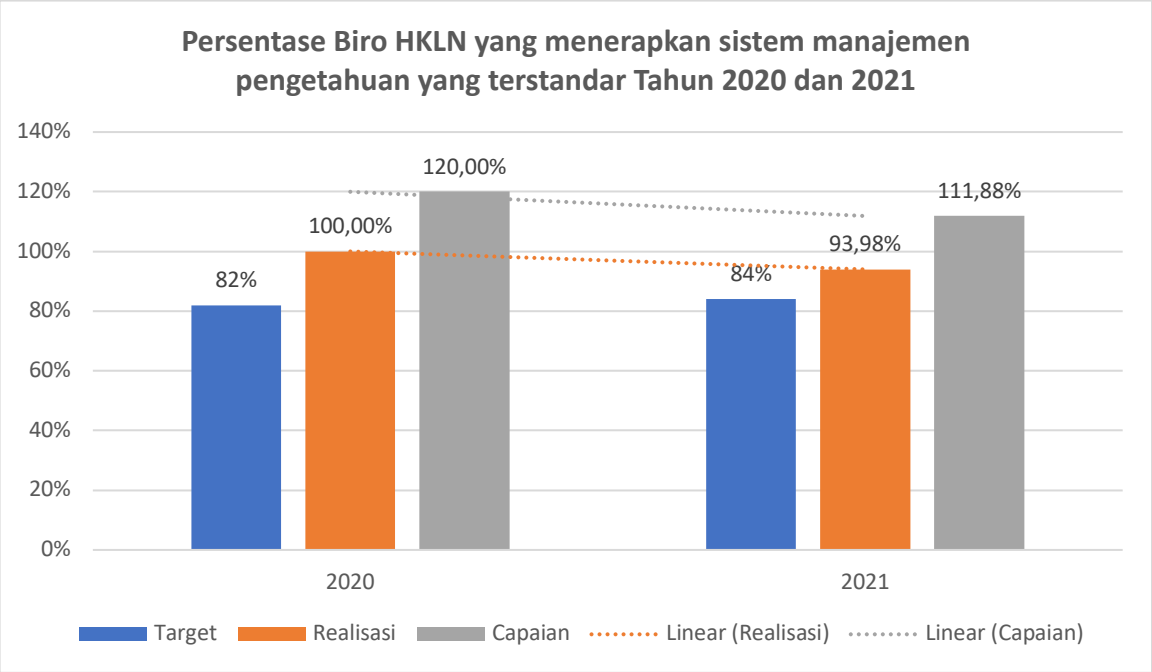

Grafik 10 Perbandingan realisasi dan capaian IKU Persentase Biro HKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2020 dan 2021

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi dimana KKP menggunakan aplikasi bitrix 14 (www.kinerjakkp.bitrix24.com) untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam bentuk *tacit knowledge* untuk diketahui, dipelajari dan digunakan kembali oleh pegawai lainnya terutama pada saat pegawai yang membagikan pengetahuan tersebut tidak lagi berada dalam organisasi. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan pengetahuan baik yang bersifat eksplisit dan *tacit* diyakini dapat turut memberikan gambaran besar dari pencapaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan. Data dan informasi pengetahuan tersebut juga dapat menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Dengan demikian, dapat membantu penyusunan arah dan program pembangunan yang optimal, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Target, realisasi dan capaian atas IKU Persentase Satuan Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2020 dan tahun 2021 dan progress kinerja untuk IKU jika dibandingkan dengan perolehan kinerja pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada kedua tabel

dan grafik di atas. Capaian untuk IKU ini diperoleh dari aplikasi Bitrix24 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Dokumen: Dokumen yang harus diunggah di aplikasi Bitrix24 yaitu dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (triwulanan) dengan bobot 20%,
- Keikutsertaan: Di lingkup Unit Eselon II, Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV wajib bergabung di aplikasi Bitrix24. Sedangkan untuk level staf, hanya 24 staf (setara 2 staf per Unit Eselon IV) yang wajib untuk bergabung dengan bobot 40%, dan
- Keaktifan: Indikator ini hanya berlaku untuk Pejabat Eselon II hingga Pejabat Eselon IV (staf tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian). Setiap pejabat agar dapat memberikan postingan setidaknya sekali setiap triwulan dengan bobot 40%.

Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab penghitungan IKU ini, untuk akhir tahun 2021 ditetapkan targetnya sebesar 84%, Hasil penghitungan yang diumumkan Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal, Biro HKLN berhasilkan meraih 93,98%. Dengan realisasi tersebut maka capaian menjadi 111,88%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target tahun 2021. Adapun upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya yaitu memastikan capaian masing-masing indikator berada pada nilai maksimal dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Menyelesaikan laporan kinerja tahun 2021 dengan tepat waktu dan ditandatangani oleh Kepala Biro HKLN serta hasilnya diunggah ke dalam drive yang disediakan Biro Perencanaan,
- Memastikan semua pejabat koordinator dan subkoordinator di Biro HKLN sudah mengunggah berita atau informasi tertulis yang berasal dari atau terkait dengan pekerjaannya sebelum 30 Desember 2021 ke aplikasi www.kinerjakkp.bitrix24.com dengan memenuhi elemen 5W+1H (*what, when, who, why, where* dan *how*) serta dilengkapi dokumentasi,
- Memantau kemajuan dari *posting* atau pengunggahan informasi atau berita ke www.kinerjakkp.bitrix24.com sembari mengevaluasi isi unggahan apakah suah memenuhi elemen yang diwajibkan.
- Melakukan koordinasi dengan pegawai Pusat Data, Statistik dan Informasi yang menjadi pengelola aplikasi kinerjakkp.bitrix24.com dalam rangka memantau sehingga dapat memastikan performa Biro HKLN atas IKU ini berjalan sesuai target yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan dalam hal substansi dan detil.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU yang sama pada periode tahun 2020 maka pada tahun 2021 mengalami penurunan pada realisasi dan pada capaian karena metode penghitungaanya telah berubah yaitu dari semula adalah nilai posisi akhir menjadi akumulasi sejak triwulan I 2021. Selain itu, belum ada penunjukkan posisi definitif subkoordinator atau pelaksana tugas subkoordinator Kerja Sama Intrakawasan selama tahun 2021. Hal ini berakibat kurangnya jumlah unggahan Biro HKLN harus dipenuhi setiap triwulan yang terakumulasi sampai dengan akhir tahun 2021. Oleh karena beberapa hal ini di bawah ini disarankan sebagai rencana peningkatan realisasi dan pencapaian Biro HKLN di tahun 2022 untuk IKU ini:

a. Penunjukkan subkoordinator atau pelaksana tugas subkoordinator definitif untuk substansi Kerja Sama Intrakawasan;
b. Pemantauan tetap dilakukan secara berkala dan tidak terputus kepada semua coordinator dan subkoordinator yang notabene adalah ASN Biro HKLN yang wajib mengunggah berita ke www.kinerjakkp.bitrix24.com setiap triwulan;
c. Memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan dengan tepat waktu; dan
d. Mengikuti setiap kegiatan pembinaan IKU oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) serta mematuhi manual IKU yang diterbitkan Pusdatin.

IKU Persentase BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional sehingga Sekretariat Jenderal KKP bisa menjadikannya sebagai acuan untuk menetapkan target. Adapun perolehan Biro HKLN untuk nilai IKU ini pada tahun 2021 di lingkup Sekretariat JJenderal memosisikan Biro HKLN pada peringkat ke-5 (Tabel 29). Meskipun begitu, nilai IKU Biro HKLN sedikit di atas realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Sekretariat Jenderal yang sebesar 93.34. Selain itu, kenyataan ini hendaknya memotivasi Biro HKLN untuk meningkatkan kinerjanya terkait IKU ini pada tahun berikutnya sehingga memperoleh nilai dan peringkat lebih tinggi. Dalam tabel di bawah ini dapat kita lihat realisasi IKU Persentase Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

No	Unit Kerja Eselon II	Realisasi	Target
1	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	97,45	84,00
2	Pusat Data, Statistik dan Informasi	96,44	84,00
3	Biro Hukum	95,33	84,00
4	Biro Perencanaan	95,14	84,00
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	93,98	84,00
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	93,31	84,00
7	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	86,61	84,00
8	Biro Keuangan	84,93	84,00

Tabel 29 Realisasi IKU Persentase unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menerapkan sistem manajemen tahun 2021

IK 10: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro HKLN berdasarkan LHP (LHP Audit Reviu dan Evaluasi) baik dalam bentuk surat maupun bab yang terbit pada Tahun 2020 sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti dan berstatus tuntas oleh Biro HKLN yang menjadi objek pengawasan.

Tahun 2021			Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
65%	65%	100%	60%	100%	166,67%	80%	Nihil	125%

Tabel 30 Ringkasan Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN

2016		2017		2018		2019		2020	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	80	69	60	100

Tabel 31 Informasi besar target dan realisasi IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2016-2020

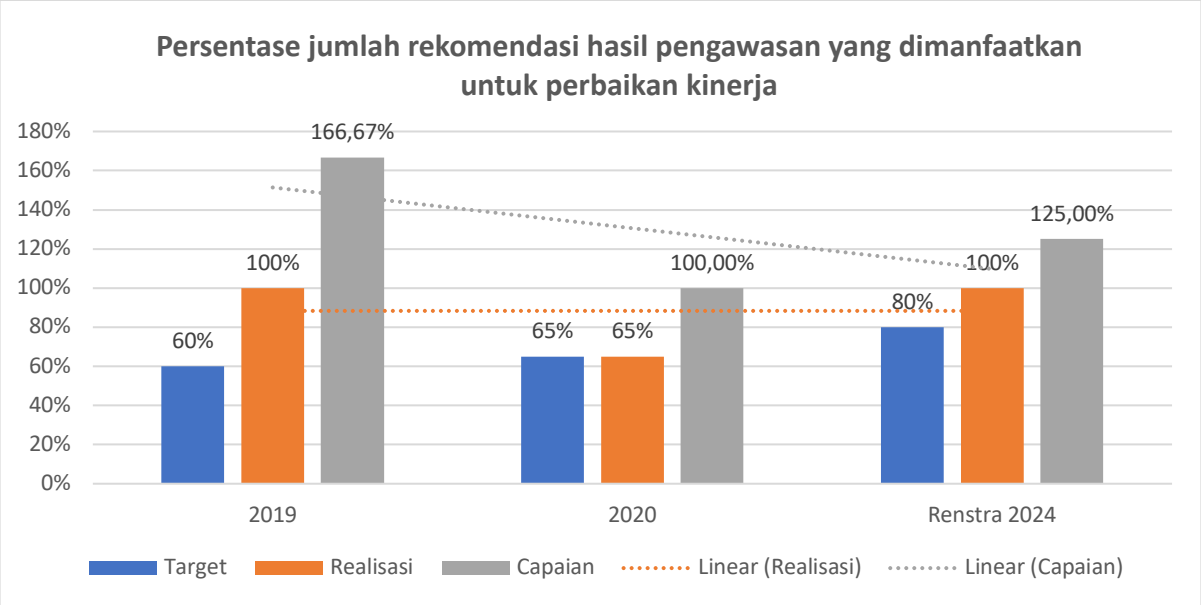

Grafik 11 Perbandingan realisasi dan capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Tahun 2020 dan 2021

Technically, *starting point* Indikator Kinerja ini adalah ketika Biro HKLN menerima rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Selanjutnya, Biro HKLN wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkup Biro HKLN. Pada tahun 2021 tidak ada rekomendasi hasil pengawasan untuk Biro HKLN. Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam Tabel di atas, realisasi Biro HKLN untuk IK ini pada tahun 2021 adalah 65%. Berbeda dengan kondisi tahun 2020 dimana juga tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan sehingga realisasi menjadi 100%, maka pada tahun 2021, berdasarkan arahan Biro Perencanan, realisasi IK adalah 65% namun capaiannya adalah 100%. Meskipun tahun 2020 dan 2021 Biro HKLN tidak menerima butir rekomendasi namun tidak menutup kemungkinan jika pada tahun 2022 akan

muncul rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Biro HKLN. Biro HKLN melalui kelompok substansi Tata Usaha kedepannya diharapkan bersikap sigap dan proaktif dan melakukan tindakan yang cepat dan cermat jika kondisi tersebut terjadi.

Jika dibandingkan dengan realisasi untuk IK ini pada periode yang sama di tahun 2020 maka pada hakikatnya tidak mengalami perubahan. Perbedannya adalah target 2022 lebih tinggi yaitu sebesar 65% daripada 2021 yang hanya 60%. Capaian di tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja Biro HKLN belum perlu untuk diberikan rekomendasi hasl pengawasan apapun sehingga harus ditindaklanjuti dalam rangka untuk memperbaiki kinerja Biro HKBP guna mendapatkan hasil dengan maksimal, konsisten dan memberi manfaat seluas mungkin.

Pada tahun 2020, terdapat perubahan/perbaikan manual IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN yaitu sebelumnya pada tahun 2019 kategorisasi berdasarkan status proses/tuntas, namun pada tahun 2020 kategorisasi capaian meningkat menjadi status tuntas/selesai, sehingga capaian IKU ini untuk tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup Biro HKLN pada tahun 2020 sebesar 0 (nol) sehingga tidak ada yang perlu ditindaklanjuti dan implikasinya adalah realisasi menjadi 100%. Dengan target sebesar 60% maka capaian IK menjadi 166,67% atau menurut aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) capaiannya sebesar 120%.

Sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro HKLN tidak pernah tidak mengikuti arahan dan langkah Sekretariat Jenderal melaksanakan Indikator Kinerja ini sepanjang tahun 2020 yaitu:

a. Menerapkan pengendalian internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya preventif pelaksanaan kegiata di lingkup Sekretariat Jenderal
b. Menyusun laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didalamnya mencakup unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian Intern terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan,
c. Menyusun laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian internal yang memadai,
d. Menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi/temuan dengan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal,
e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan rekomendasi,
f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal sebagai mitra Sekretariat Jenderal dalam penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja.

Rencana pada tahun anggaran berikutnya, Biro HKLN akan mencoba untuk berpedoman kepada beberapa butir rekomendasi yang dirumuskan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan IK persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN yaitu sebagai berikut:

a. Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Biro HKLN dengan dukungan pendampingan dari unit kerja terkait lingkup KKP seperti Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan,
b. Menyusun laporan SPIP dan PIPK dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan meminimalisasi risiko yang bisa atau akan terjadi,
c. Menghadiri rapat koordinasi dengan Inspektorat I sebagai Mitra Sekretariat Jenderal apabila diundang.

Di dalam tabel di bawah ini, tersaji data rekapitulasi realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2021.

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendas (%)
1	Biro Perencanaan	23	23	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	10	10	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	10	10	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	19	19	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	20	20	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	0	0	100,00	0	00,00
7	Pusdatin	25	25	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	11	11	100,00	0	00,00
TOTAL		**118**	**118**	**100,00**	**0**	**00,00**

Tabel 32 Rekapitulasi realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2021

Gambar 9 Inspektur Jenderal KKP memimpin Inspektorat Jenderal KKP merumuskan rekomendasi hasil pengawasan untuk dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja

Analisis Realisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran Biro HKLN Tahun 2021

Realisasi penyerapan anggaran merupakan salah satu elemen esensial dalam pengawasan dan pengendalian kinerja dimana persentase yang didapat dari realisasi dibandingkan dengan pagu anggaran turut memberi informasi dan gambaran global mengenai sejauh mana pencapaian kinerja organisasi terhadap rencana yang telah disusun. Pencapaian dalam realisasi anggaran memiliki karakter tersendiri yaitu periode yang fleksibel diantaranya yaitu, triwulan, semester dan tahunan. Pada semua unit kerja pemerintah, anggaran jelas memiliki peran sangat penting karena seluruh kegiatan yang merupakan unsur dasar dari pembentukan kinerja dan pencapaian target kinerja organisasi senantiasa memerlukan pembiayaan. Dalam manajemen organisasi, anggaran juga dapat menjadi alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi serta instrument untuk melakukan pengendaliaan dalam rangka memberikan rencana detail.

Realisasi anggaran memberikan kita informasi atas penyerapan yang disampaikan dalam bentuk entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi realisasi belanja dari pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Realisasi anggaran berguna bagi para pembaca dan pengguna laporan kinerja ini dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya, akuntabilitas dan ketaatan dalam hal pelaporan capaian kinerja terhadap anggaran.

Hingga akhir tahun 2021, realisasi anggaran Biro HKLN sebesar Rp. 19.305.170.178 atau jika dihitung persentasenya adalah sebesar 99,62%. Pada Tahun 2021 format pengelolaan anggaran seluruh kegiatan di KKP berubah menjadi 1 DIPA, dengan anggaran DIPA Satker Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2021 senilai Rp 19.379.761.000,-. Terdapat 5 (lima) Rincian Output (RO) Biro HKLN pada anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kerja Sama;
2) Layanan Kehumasan;
3) Sarana Internal;
4) Umum; dan
5) Layanan Perkantoran.

dimana keseluruhan RO di atas adalah bagian dari Program Dukungan Manajemen.

Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran akhir tahun 2020, pagu anggaran akhir Biro HKLN tahun 2021 mengalami perubahan dari Rp 16.268.270.866,- menjadi Rp 19.379.761.000 atau naik sebesar 16,54%. Perlu diingat bahwa sepanjang tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocusing* anggaran seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berdampak kepada perubahan anggaran yang dikelola oleh Biro HKLN dari semula di awal tahun 2021 senilai Rp 32.393.562.000,- berubah menjadi Rp 19.379.761.000,- atau terjadi penurunan sebesar 40,17 %. Pagu dan realisasi anggaran Biro HKLN menurut RO tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa (Rp)
1	Kerja Sama	2.341.381.000	2.299.345.103	98,20%	42.035.897
2	Layanan Kehumasan	9.617.395.000	9.614.902.238	99,97%	2.492.762
3	Sarana Internal	3.694.960.000	3.689.231.800	99,84%	5.728.200
4	Umum	557.378.000	546.002.901	97,96%	11.375.099
5	Layanan Perkantoran	3.168.647.000	3.155.688.136	99,59%	12.958.864
		19.379.761.000	**19.305.170.178**	**99,62%**	**74.590.822**

Tabel 33 Realisasi Anggaran Biro HKLN tahun 2021

Realisasi penyerapan DIPA per 31 Desember 2021 di atas adalah berdasarkan aplikasi OM-SPAN dari pagu DIPA *refocusing* senilai Rp 19.379.761.000,- dengan realisasi di akhir tahun 2021 sebesar Rp. 19.305.170.178,- sehingga persentase realisasi Biro HKLN adalah sebesar 99,62%. dan sisa anggaran sebesar Rp. 74.590.822,-. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran pada akhir tahun 2020 maka di akhir tahun 2021 mengalami kenaikan dari 98,90% menjadi 99,62%.

Adapun langkah yang telah diambil Biro HKLN sepanjang tahun 2021 dalam rangka penyerapan dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:
1. Pemantauan rutin berkala oleh kepala Biro HKLN dengan dibantu oleh subkoordinator dan tim satker mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran di internal Biro HKLN;
2. Implementasi rencana kegiatan yang diusahakan selalu sesuai dengan rencana penjadwalannya; dan
3. Keandalan dan pengalaman para pegawai pengelola keuangan dalam menyiapkan dan memproses administrasi keuangan dengan tertib berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan besar realisasi anggaran sebesar 99,62% maka dapat disimpulkan relatif tidak kendala berarti dihadapi Biro HKLN dalam penyerapan/realisasi anggaran sepanjang tahun 2021 meskipun di awal tahun menghadapi hal-hal yang relatif baru dalam pengelolaan keuangan seperti:

1) Pemberlakuan kebijakan 1 DIPA dilingkup Sekretariat Jenderal KKP mengakibatkan bendahara pengeluaran seluruh kegiatan berada di Biro Umum dan PBJ sehingga dikhawatirkan berpotensi adanya hambatan dan keterlambatan proses pencairan di masing-masing Biro lingkup Setjen kendati pada pelaksanaan sepanjang tahun 2021 ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti; dan
2) Adanya kebijakan refocusing anggaran I sampai dengan IV, yang memakan waktu proses revisi DIPA sehingga agak mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran.

Apresiasi Sepanjang Tahun 2021

Beberapa apresiasi atau penghargaan yang diraih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui kinerja Biro HKLN pada tahun 2021 adalah:

1. Penghargaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas sumbangsih dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Deelopment Goals (TPB/SDGs), tanggal 24 November 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada berkat peran aktif KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan TPB/SDGs. Untuk mendukung pencapaian target TPB/SDGs tersebut, KKP melakukan beberapa program di antaranya meningkatkan luas kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan, meningkatkan akses pendanaan stakeholders kelautan dan perikanan, memberikan perlindungan nelayan melalui asuransi nelayan, menyusun kebijakan penataan ruang laut nasional seperti Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, serta berkontribusi dalam penurunan jumlah sampah ke laut.

   Sekretaris Jenderal Antam Novambar memberikan sambutan dengan menyatakan bahwa KKP akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs dari sektor kelautan dan perikanan, terutama Goal ke-14 Life Below Water dan akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs melalui koordinasi dengan Bappenas, Kemenko Marinves dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam jangka menengah KKP akan menerapkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru sesuai dengan tuntutan pembangunan masa depan. IImplementasi dari ekonomi biru telah dituangkan dalam program-program prioritas yang senantiasa disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono.

   Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs ini berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut '*No One Left Behind*'. TPB/SDGs memiliki 17 agenda yang menjadi komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat diantaranya tujuan pembangunan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak dan energi bersih dan terjangkau.

Gambar 10 Penghargaan TPB/SDGs Tahun 2021 dari Kementerian PPN/Bappenas

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima 2 penghargaan yaitu sebagai pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021, Terpopuler di Media Digital 2021, kategori Kementerian, diraih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemenang Anugerah Humas Indonesia 2021, Terpopuler di Media Digital 2021, kategori Menteri, diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kedua penghargaan prestisius tersebut diberikan oleh Humas Indonesia (*member of* PR Indonesia Group) pada tanggal 17 September 2021 dalam ajang kompetisi Anugerah Humas Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh PR Indonesia Group.

   Menurut CEO PR Indonesia Group sekaligus Pemimpin Redaksi Humas Indonesia, keberhasilan KKP dan Menteri Kelautan dan Perikanan memenangkan penghargaan Terpopuler di Media Digital dalam Anugerah Humas Indonesia 2021 antara lain berkat kebijakan yang sangat tegas sekaligus konsisten dan dirasakan manfaatnya bagi ekosistem kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagai akibatnya, kebijakan KKP menimbulkan dampak berupa manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta popularitas KKP Menteri Kelautan dan Perikanan di media digital dalam pantauan PR Indonesia Group sangat populer dan didominasi oleh nada positif.

   Penilaian oleh Humas Indonessia dilakukan berdasarkan jumlah eksposur positif tertinggi di media digital. Dalam rangka proses penilaiannya, Humas Indonesia bekerja sama dengan Kazee Digital Indonesia yang sudah melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di 7.015 media online lokal, 962 media online nasional, dan 2.338 media online internasional. Kegiatan monitoring dilakukan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, dengan menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisis kuantitatif.

Bagi KKP secara umumnya dan Biro HKLN secara spesifik, kedua penghargaan ini dapat menjadi bahan bakar untuk terus berkarya bagi tim komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mempertahankan reputasi sebagai kementerian yang dipercaya oleh publik dalam menjalankan amanah undang-undang menjaga dan mengelola sektor kelautan dan perikanan. Kedua penghargaan tersebut turut menjadi penyemangat bagi tim komunikasi KKP untuk terus beriniovasi di era digital agar pesan-pesan terkait sektor kelautan dan perikanan yang ingin disampaikan ke publik bisa tepat sasaran dan berhasil tidak hanya sampai pada tataran output tetapi juga pada *outcome*. Lebih lanjut, kompetisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif segenap institusi publik seperti kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian.

Gambar 11 Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2021 kategori Kementerian dan Menteri

3. Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada KKP Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 sebagai Badan Publik Informatif kategori Kementerian. Pemberian penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021 berlangsung secara virtual pada tanggal 26 Oktober 2021. Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin serta diikuti 337 badan publik meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik.

   KKP memperoleh nilai 96 atau meningkat empat poin dari tahun sebelumnya. Proses yang diikuti KKP meliputi pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) dengan indikator penilaian pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan dan penyediaan informasi publik. Selanjutnya, ttahapan pengujian lapangan Komisi Informasi Pusat ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan Ketua dan Komisioner KIP tersebut untuk melihat langsung implementasi aplikasi Si Chupang yang merupakan inovasi KKP untuk meningkatkan kualitas layanan informasi ke masyarakat. Setelah tahapan tersebut, berikutnya adalah tahapan presentasi untuk menjabarkan lebih jauh mengenai invoasi dan kolaborasi yang sudah dilakukan KKP.

Pencapaian klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan semakin optimalnya kinerja KKP dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Melalui penerimaan atas penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi sehingga prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik.

Gambar 12 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2021 menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mencapai sasaran strategis Biro HKLN yaitu Tata kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro HKLN sepanjang tahun 2021. Perlu untuk diperhatikan bahwa sepanjang tahun 2021, Indonesia dan dunia masih dilanda bencana global yaitu pandemi covid-19 dimana kondisi ini berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan sosial di semua negara beserta jajaran pemerintahannya termasuk Biro HKLN yang notabene yang adalah unit kerja pemerintahan pusat di Indonesia.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2021 Biro HKLN mampu mencapai hampir semua Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil dari aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Biro HKLN di akhir tahun 2021 berada di angka 105,62 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 104,20. Pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya dengan menjaga komitemen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh jajaran Biro HKLN beserta semua *stakeholder* Biro HKLN.

Kesimpulan

1. Realisasi ke 10 IK dan IKU Biro HKLN tahun 2021 adalah sebagai berikut:
   a. IK 1 yaitu Komponen nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN realisasinya sebesar 3,91%. Target tahun 2021 adalah 3,56 maka realisasi IKU ini melampaui target sehingga capaian sebesar 108,61%,
   b. IK 2 yaitu Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan realisasinya sebesar 3,73%. Target tahun 2021 adalah 4,3 maka realisasi IKU ini belum berhasil mencapai target sehingga capaian sebesar 86,74%,
   c. IKU 3 yaitu Nilai rekonsiliasi kinerja Biro HKLN realisasinya 96,30. Target tahun 2021 adalah 91 maka realisasi IKU ini memenuhi target dengan capaian sebesar 105,82%,
   d. IKU 4 yaitu Nilai keterbukaan informasi publik realisasinya adalah 96. Target tahun 2021 adalah 85 maka realisasi IKU ini melampaui target sehingga capaian menjadi 112,94%,
   e. IKU 5 yaitu Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama realisasinya sebesar 105,71%. Target tahun 2021 adalah 90% maka realisasi IKU ini berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 117,45%,
   f. IKU 6 yaitu rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan realisasinya sebesar 99,17%. Target tahun 2021 adalah lebih besar daripada 86% maka realisasi IKU ini Kembali sukses memenuhi target dengan capaian sebesar 113,28%,
   g. IK 7 yaitu persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN realisasinya 100%. Target tahun 2021 adalah 100% maka realisasi IKU ini tepat memenuhi target sehingga capaiannya adalah 100%,
   h. IK 8 yaitu Indeks profesionalitas ASN Biro HKLN, realisasinya adalah 77,53. Pada tahun 2021, target untuk IK ini adalah 73, oleh karena itu realisasi IK berhasil memenuhi target dengan capaian menjadi 106,20%,
   i. IKU 9 yaitu persentase unit kerja lingkup BHKLN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perolehan realisasi untuk IKU ini di tahun 2021 adalah 93,98%. Oleh karena target 2021 adalah sebesar 84% maka realisasi IKU berhasil melampaui target sehingga capaian menjadi 111,88%,
   j. IK 10 yaitu Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN, diperoleh realisasi sebesar 65%. Dengan target

tahunan IK ini sebesar 65% maka realisasi IK berhasil melampaui target sehingga capaiannya menjadi 100%.

2. Untuk menggenapkan seluruh target kinerja (IK dan IKU) tahun 2021, Biro HKLN telah menyerap anggaran sebesar Rp. 19.305.170.178,- dari pagu sebesar anggaran Rp. 19.379.761.000,-. Ini artinya pada tahun 2021 Biro HKLN menyerap 99,62% dari total anggaran (APBN) yang dialokasikan membiayai pelaksanaan seluruh target kinerja Biro HKLN.

Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN tahun 2021 maka rencana yang direkomendasikan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Indikator Kinerja yang capaiannya di tahun 2021 masih di bawah 100%, maka Biro HKLN di tahun 2022 harus memberi perhatian dan upaya lebih besar agar capaiannya bisa menjadi 100% atau lebih. Terlebih target Indikator Kinerja/Indikator Kinerja Utama tahun 2022 pada umumnya akan meningkat besarnya dibandingkan tahun 2021.
2. Biro HKLN seyogyanya terus memegang teguh dan melanjutkan etos kinerja prima yang sudah ditunjukkan selama tahun 2021. Beberapa etos kerja dan kinerja sebagai hasil dari implementasi nilai budaya kerja Biro HKLN adalah disiplin, kebersamaan, keterbukaan, proaktif, integritas, responsif, berorientasi masa depan dan tanggung jawab.
3. Memperkuat koordinasi di lingkup internal Biro HKLN dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro HKLN guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target semua IKU,
4. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu ditekankan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

BAB IV

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 (ditandatangani pada Januari 2021)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Tri Prasetyo**
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	1	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,6
	2	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan (nilai)	4,3
	3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	91
	4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	85
	5	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (persen)	90
	6	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	>86
	7	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
	8	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	73
	9	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
	10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	65

No	Kegiatan
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum
	Jumlah anggaran kegiatan: Rp. 46.307.790.000,-

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

2. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2021 pasca revisi (ditandatangani pada 1 September 2021)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agung Tri Prasetyo**
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Antam Novambar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	1	Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,6
	2	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal program Manajemen Perubahan (nilai)	4,3
	3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	91
	4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	85
	5	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (persen)	90
	6	Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	>86
	7	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
	8	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	73
	9	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
	10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	65

No	Kegiatan
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum
	Jumlah anggaran kegiatan: Rp. 15.879.801.000,-

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Agung Tri Prasetyo